

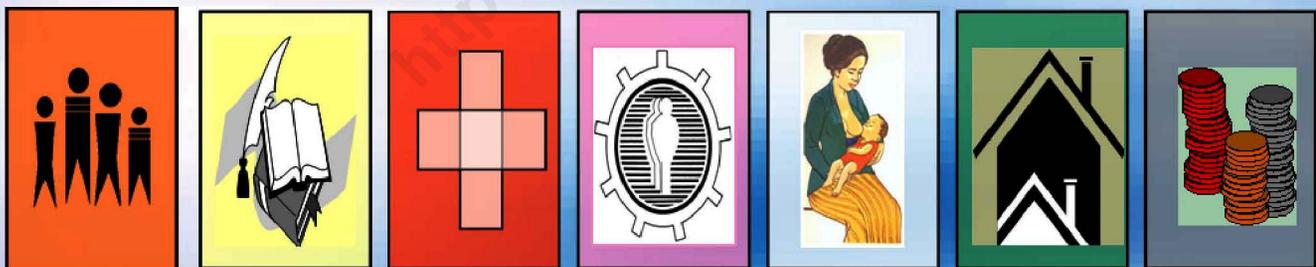


Katalog : 4102004.1211
No. Publikasi : 12112.11.01

INKESRA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Karo
Tahun 2010



Kerjasama Penyusunan dengan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN KARO
2010**

No. Katalog BPS : 4102004.1211
No. Publikasi : 12112.11.01
Jumlah Halaman : 113 + ix
Ukuran Buku : 21,59 x 27,94 cm

***Naskah* :**
Seksi Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

***Gambar Kulit* :**
Seksi Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo

***Diterbitkan Oleh* :**
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo

Sumber Dana :

Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Karo

Tahun Anggaran 2011

(Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya)

INKESRA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN KARO

Hasil **SUSENAS**
(Survei Sosial Ekonomi Nasional)

2010

<http://karokab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

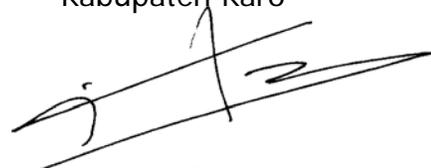
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo menerbitkan publikasi "**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KARO TAHUN 2010**". Dalam publikasi ini disajikan informasi dasar aspek sosial meliputi bidang: Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Kemiskinan, Pola Konsumsi dan IPM serta Perumahan.

Informasi dasar aspek sosial tersebut merupakan penjelasan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat secara umum yang telah dicapai hingga tahun 2010 berdasarkan penilaian atas bidang-bidang tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membuat kebijakan dan evaluasi pembangunan.

Akhirnya kepada BPS Kabupaten Karo sebagai Tim Penyusun sehingga publikasi ini dapat diterbitkan diucapkan terimakasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data.

Kabanjahe, Oktober 2011

Plh. Kepala Bappeda
Kabupaten Karo



ABEL TARWAI TARIGAN, S.Sos, MT
Penata Tingkat I
NIP. 19740315 199303 1 007

KATA SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, BPS Kabupaten Karo telah dapat menyelesaikan penyusunan Publikasi “ Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo” . Dalam publikasi ini disajikan informasi dasar aspek sosial meliputi bidang: Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan , Ketenagakerjaan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Kemiskinan, Pola Konsumsi dan IPM serta Perumahan.

Informasi dasar aspek sosial yang disajikan dalam publikasi ini menjelaskan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat secara umum yang telah dicapai hingga tahun 2010. Berdasarkan indikator-indikator tersebut dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk kebijakan dan evaluasi pembangunan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada BAPPEDA KABUPATEN KARO atas diikut sertakan BPS Kabupaten Karo didalam tim penyusunan publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi kita semua.

Berastagi, Oktober 2011

Badan Pusat Statistik
Kabupaten Karo
Kepala,



DONI BUKIT, SE
NIP. 19600618 198101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Kata Sambutan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Penjelasan Teknis	1
Bab 1. Pendahuluan	14
1.1. Latar Belakang	14
1.2. Maksud dan Tujuan	15
1.3. Sumber Data	16
1.4. Sistematika Penyajian	16
Bab 2. Metode Survei	19
2.1. Ruang Lingkup	19
2.2. Kerangka Sampel	20
2.3. Rancangan Sampel	20
2.4. Pengolahan Data	21
2.5. Konsep dan Defenisi	21
Bab 3. Kependudukan	
3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	35
3.2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	39
3.3. Kepadatan dan Distribusi Penduduk	40

Bab 4. Pendidikan	44
4.1. Angka Partisipasi Sekolah	46
4.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	49
4.3. Angka Buta Huruf	53
Bab 5. Kesehatan	57
5.1. Angka Kesakitan	58
5.2. Penolong Kelahiran	63
5.3. Angka Kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR)	65
5.4. Pemberian ASI	67
5.8. Angka Harapan Hidup	69
Bab 6. Fertilitas dan Keluarga Berencana	74
6.1. Usia Perkawinan Pertama	75
6.2. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	76
6.3. Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak Yang Masih hidup	78
6.4. Keluarga Berencana	81
Bab 7. Kemiskinan, Pola Konsumsi dan IPM	86
7.1. Kemiskinan	86
7.2. Pola Konsumsi	87
7.3. Persentase Pengeluaran Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita/Bulan	89
7.4. Pembangunan Manusia	90
Bab 8. Ketenagakerjaan	95
8.1. Penduduk Angkatan Kerja	97
8.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	98
8.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	98
8.4. Lapangan Pekerjaan	99
8.5. Status Pekerjaan	101

Bab 9. Perumahan dan Lingkungan	105
9.1. Kondisi Rumah	106
9.2. Fasilitas Rumah	109

<http://karokab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kependudukan	
Tabel 3.1. Perkembangan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo, 2000-2010	38
Tabel 3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Per Kecamatan, Jenis Kelamin	40
Tabel 3.3. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan	42
2. Pendidikan	
Tabel 4.1. Persentase Penduduk Yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010	48
Tabel 4.2. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin 2010	49
Tabel 4.3. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Ijasah Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin 2010	51
Tabel 4.4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Buta Huruf Menurut Kelompok Kepandaian Membaca dan Menulis, dan Jenis Kelamin	55
3. Kesehatan	
Tabel 5.1. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Keluhan Kesehatan dalam Sebulan, 2010	60
Tabel 5.2. Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Hari Sakit, 2010	61
Tabel 5.3. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Balita di Kabupaten Karo, 2010	64
Tabel 5.4. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Karo dan Sumatera Utara 2011-2007	67
Tabel 5.5. Persentase Balita yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Disusui dan Jenis Kelamin Balita di Kabupaten Karo, 2010	68
Tabel 5.6. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Karo dan Sumatera Utara tahun 1999-2010	71

6. Fertilitas dan Keluarga Berencana		
Tabel 6.1.	Persentase Wanita berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, Kabupaten Karo 2010	76
Tabel 6.2	Angka kelahiran Total (TFR) Kabupaten Karo dan Sumatera Utara 2003 - 2008	77
Tabel 6.3	Persentase Wanita Usia 10 Tahun Keatas Yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak Yang Dilahirkan Hidup, Masih Hidup, Sudah Meninggal	80
Tabel 6.4	Persentase Wanita Berumur 15 – 49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Cara/Alat BerKB Tahun 2010	82
Tabel 6.5	Persentase Wanita Yang Berstatus Kawin, dan Masih Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Alat/Cara KB Yang digunakan	83
7 Kemiskinan, Pola Konsumsi dan IPM		
Tabel 7.1.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Menurut Jenis Konsumsi Pengeluaran Perkapita/Bulan	89
Tabel 7.2	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita/Bulan Tahun 2010	90
Tabel 7.3	Tingkatan Status dan Kriteria Pembangunan Manusia	92
8. Ketenagakerjaan		
Tabel 8.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu, 2008-2010	76
Tabel 8.2	Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karo, 2010	102
9. Perumahan		
Tabel 9.1.	Kondisi Perumahan Kabupaten Karo, 2010	107
Tabel 9.2	Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Karo, 2010	110
Tabel 9.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, di Kabupaten Karo 2010	111
Tabel 9.4	Persentase Rumahtangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Buang Air Besar, 2010	112

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kependudukan	
Gambar 3.1. Perkembangan LPP Kabupaten Karo 1990 s/d 2010	36
2. Pendidikan	
Gambar 4.1. Persentase Penduduk Menurut Ijasah Tertinggi Yang Dimiliki Tahun 2010	53
3. Kesehatan	
Gambar 5.1. Persentase Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan Tahun 2010	62
Gambar 5.2. Penolong Kelahiran Pertama Kabupaten Karo Tahun 2010	65
Gambar 5.3. Persentase Balita Yang Pernah Disusui Menurut Jenis Kelamin dan Lamanya Disusui, 2010	69
Gambar 5.4. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Karo 2003-2010	72
4. Fertilitas dan Keluarga Berencana	
Gambar 6.1. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak Yang Masih Hidup, 2010	79
Gambar 6.2. Persentase Jenis Alat KB yang digunakan Tahun 2010	84
5. Kemiskinan, Pola Konsumsi dan IPM	
Gambar 7.1. Trend Persentase Penduduk Miskin Karo, 2006 - 2010	87
Gambar 7.2. Perbandingan IPM Karo 2002 -2010	93
6. Ketenagakerjaan	
Gambar 8.1. Penduduk Bekerja di Kabupaten Karo Menurut Lapangan Usaha 2010	101
Gambar 8.2. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin 2010	103
7. Perumahan dan Lingkungan	
Gambar 9.1. Persentase Rumahtangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Karo, 2010	106

Gambar 9.2.	Persentase Rumahtangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Karo, 2010	109
Gambar 9.3	Persentase Rumahtangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Karo, 2010	113

<http://karokab.bps.go.id>

1. KEPENDUDUKAN

- **Kepadatan penduduk** adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi
- **Rata-rata pertumbuhan penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk pada tahun tertentu (dasar).
- **Rasio jenis kelamin** atau **Sex Rasio** adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- **Rasio Ketergantungan** atau **Dependency Ratio** adalah perbandingan antara banyaknya penduduk usia tidak produktif (kelompok usia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun ke atas) dengan banyaknya penduduk usia produktif (kelompok usia 15-64 tahun). Indikator ini lebih dikenal dengan istilah rasio beban tanggungan.

2. PENDIDIKAN

- **Sekolah** adalah kegiatan belajar di sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- **Tidak/belum pernah sekolah** adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- **Masih bersekolah** adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- **Tidak sekolah lagi** adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- **Tamat sekolah** adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- **Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan)** adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- **Rasio murid terhadap guru** adalah jumlah murid SD/SMTP/SMTA dibagi jumlah guru SD/SMTP/SMTA.

- **Rata-rata banyaknya murid per sekolah di SD/SMTP/SMTA** adalah jumlah murid SD/SMTP/SMTA dibagi jumlah sekolah SD/SMTP/SMTA.
- **Gross Enrollment Ratio SD/SMTP/SMTA** adalah murid SD/SMTP/SMTA dibagi jumlah penduduk usia sekolah yang bersangkutan.
- Data pendidikan yang bersumber dari Kantor Departemen Pendidikan Nasional dan terbatas pada data sekolah-sekolah yang berada dibawah pembinannya.

3. KESEHATAN DAN GIZI

- **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- **Imunisasi** adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan kedalam tubuh agar tubuh mempunyai kekebalan terhadap penyakit tertentu.
- **Konsultasi** adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.

- **Pemeriksaan kesehatan** adalah pengamatan tingkat kesehatan seseorang baik karena mempunyai keluhan maupun untuk mengetahui ada tidaknya penyakit sedini mungkin. Pemeriksaan kesehatan dapat bersifat menyeluruh, atau sebagian dari tubuh, atau sebagian kecil saja dari tubuh.
- **Rawat jalan atau berobat jalan** adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri.
- **Rawat inap** adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.
- **Rasio pelayanan fasilitas kesehatan, tenaga medis per 1000 penduduk** adalah banyaknya fasilitas kesehatan, tenaga medis dibagi jumlah penduduk di kali 1000.
- **Rasio anak dan wanita** adalah jumlah anak dibawah umur 5 tahun per seribu wanita dalam usia reproduksi (15-49 tahun) dalam suatu waktu tertentu.

- **Angka Kematian Bayi** atau **Infant Mortality Rate** adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi berumur dibawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam satu tahun.
- **Angka Harapan Hidup waktu lahir** adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.
- **Angka Fertilitas Total** adalah banyaknya anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya dengan asumsi bahwa perilaku kelahirannya sama untuk setiap kelompok umur.
- **Angka Kelahiran Kasar (CBR)** adalah rata-rata jumlah bayi yang lahir per seribu penduduk dalam waktu tertentu.
- **Fasilitas dan tenaga kesehatan** yang dimaksud adalah yang berada dalam pembinaan dan bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

4. KETENAGAKERJAAN

- **Angkatan Kerja** adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan mendapat pekerjaan.

- **Bukan Angkatan Kerja** adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.
- **Kegiatan yang terbanyak dilakukan** adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.
- **Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen dan mogok, termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.
- **Labour Force dan Gainful Worker**
Dewasa ini ada dua pendekatan yang biasa dipakai untuk mengumpulkan data tentang angkatan kerja, yaitu secara *Gainful Worker* dan *Labour Force*. Data yang dikumpulkan dengan cara *Gainful Worker* lebih bersifat stabil karena kegiatan/pekerja yang dimaksud adalah merupakan kegiatan/pekerja yang biasa dilakukan dalam jangka waktu (time

reference) tertentu. Pengumpulan data tentang angkatan kerja yang dilakukan oleh BPS selama ini menggunakan cara *Labour Force* yaitu kegiatan/pekerja yang dilakukan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dalam jangka waktu tertentu.

- **Tenaga kerja** adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap mereka dan mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
- **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- **Jam kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (10 tahun ke atas).
- **Penduduk yang bekerja** adalah penduduk yang sudah bekerja termasuk yang sementara tidak bekerja.

- **Penduduk yang menganggur** adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

5. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

- **Anak lahir hidup** adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernapas dan menangis.
- **Angka Fertilitas Total** adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita pada masa reproduksinya dengan anggapan perilaku kelahiran untuk setiap kelompok umur adalah sama.
- **Angka Pertumbuhan Alamiah** adalah selisih antara angka kelahiran dan angka kematian.
- **Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif (penduduk berumur di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk yang termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun).
- **Metode kontrasepsi** adalah cara/alat kontrasepsi yang dipakai untuk mencegah kehamilan.
- **Peserta keluarga berencana (akseptor)** adalah orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.

- **Peserta keluarga berencana (akseptor) baru** adalah orang yang baru pertama kali memakai/mempergunakan metode kontrasepsi dan akseptor sesudah persalinan/keguguran.
- **Peserta keluarga berencana (akseptor) aktif** adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- **Pasangan Usia Subur (PUS)** adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.
- **Klinik Keluarga Berencana** adalah suatu tempat atau fasilitas dimana dapat diperoleh pelayanan medis KB dengan cara-cara kontrasepsi. Tempat ini dapat berupa Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), Tim Medis Keliling (TMK) dan tempat-tempat bebas lainnya yang ditentukan. TMK adalah tim yang memberikan pelayanan yang bersifat mobile.

6. KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

- **Konsumsi/pengeluaran rumah tangga** adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi dua macam, yaitu pengeluaran untuk makanan (termasuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (termasuk pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- **Konsumsi rata-rata per kapita setahun**, angka ini diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan 52.

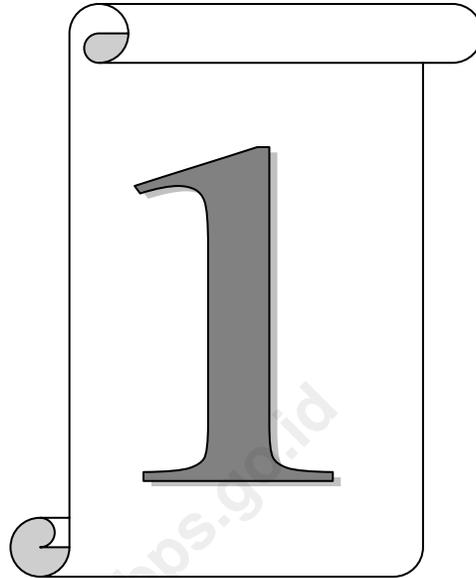
- **Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan**, angka ini mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah dan juga termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.
- **PDRB per kapita** adalah hasil bagi PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- **Pendapatan regional per kapita** diperoleh dengan cara membagi Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- **Pendapatan per kapita** adalah Produk Regional Netto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- **Konsumsi beras** mencakup keseluruhan beras termasuk beras ketan.
- **Konsumsi jagung** termasuk jagung pocelan, jagung basah, jagung kering dan tepung jagung yang keseluruhannya telah dikonversikan ke dalam jagung pocelan.
- **Pemerataan distribusi pendapatan** biasanya diukur dengan suatu indeks yang dinamakan indeks gini atau Gini Ratio, selain itu juga ada yang berdasarkan kriteria Bank Dunia. Indeks Gini bernilai antara 0 dan 1, sedangkan Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi 3 (tiga) golongan yaitu 40 persen penduduk berpenghasilan rendah, 40 persen berpenghasilan sedang dan 20 persen berpenghasilan tinggi.

7. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- **Bangunan fisik** adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- **Bangunan sensus** adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.
- **Luas lantai** adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- **Rumah tangga** adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Termasuk pula seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh dan mengurus keperluan sendiri.
- **Dinding** adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- **Atap** adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami di bawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- **Air ledeng** adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi

berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PDAM (Perusahaan daerah Air Minum).

- **Air Sumur/perigi terlindung** adalah bila lingkaran mulut sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.
- **Kloset/dudukan leher angsa** adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran berbentuk "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
- **Plengsengan** adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
- **Cemplung/cubluk** adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya tidak ada saluran langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhir.
- **WC lainnya** adalah yang tidak mempunyai tempat untuk duduk/jongkok termasuk yang tidak mempunyai jamban/kakus.



PENDAHULUAN

*Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penyajian*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan bangsa merupakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan secara eksplisit telah dituangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi yang berwenang di bidang perstatistikan, bertanggung jawab atas ketersediaan data dan informasi pembangunan secara berkesinambungan, guna menopang perencanaan pembangunan. Kebutuhan data sosial, khususnya mengenai tingkat kesejahteraan rakyat perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan telah dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut berbagai aspek kebutuhan hidup seperti disebut di atas.

Salah satu upaya BPS untuk memenuhi kebutuhan konsumen (user) akan data mengenai kesejahteraan rakyat adalah publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)**. Inkesra merupakan publikasi yang menyajikan berbagai macam data yang sudah diolah ulang menjadi suatu kumpulan indikator. Data Statistik yang disajikan dipilih sedemikian rupa sehingga secara langsung atau tidak

langsung memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo.

Data sosial yang dihasilkan BPS dikumpulkan melalui beberapa wahana, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Namun demikian, karena begitu luasnya cakupan bidang kesejahteraan rakyat maka tidak semua jenis data dapat dikumpulkan setiap tahun, padahal hasil pembangunan perlu dipantau setiap tahun agar kemajuan program dapat diketahui dan dievaluasi. Untuk ini perlu suatu perbaikan dalam sistem pengumpulan data kesejahteraan rakyat.

Dari survei-survei rumahtangga yang diselenggarakan BPS, SUSENAS merupakan survei yang mempunyai cakupan data sosial paling luas. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial budaya, fertilitas, keluarga berencana, perumahan, lingkungan, konsumsi dan pengeluaran.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Karo. Indikator ini dapat dijadikan sebagai kompas yang tepat dalam pelaksanaan pembangunan.

Melalui Analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat, Perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan kejelasan mengenai kondisi berbagai dimensi

kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan dimasa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun akan bersifat efektif dan efisien, utamanya untuk segera melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi yang berdasarkan indikator-indikator yang ada. Pada akhirnya usaha Pemerintah Kabupaten Karo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

1.3 SUMBER DATA

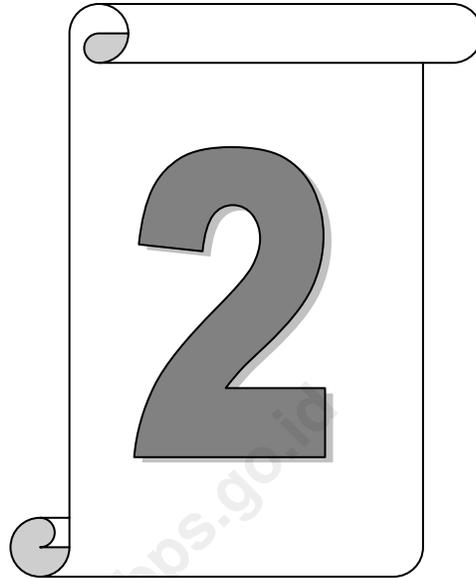
Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan. Selain itu juga diperkaya dengan data sekunder terutama yang berasal dari instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) bagian, yaitu :

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2010. Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan hasil SP2010 yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan

kepadatan/penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga. Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi pendidikan di Kabupaten Karo, dari sisi kualitas pendidikan penduduk. Kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya. Aspek fertilitas dan keluarga berencana dibahas pada bagian enam. Aspek kemiskinan, pola konsumsi dan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) serta ketenagakerjaan akan dibahas pada bagian tujuh dan delapan. Penyajian indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Karo 2010 tentang aspek perumahan dibahas pada bagian sembilan.



METODE SURVEI

*Ruang Lingkup
Kerangka Sampel
Rancangan Sampel Susenas
Pengolahan Data
Konsep dan Definisi*

BAB II METODE SURVEI

Sumber data Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) ini berasal dari survey BPS yang berkenaan dengan kesejahteraan rakyat, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan juga dari sumber lainnya seperti Sensus Penduduk dan Kabupaten Dalam Angka. Oleh karena itu perlu ditetapkan konsep dan defenisi baku yang melandasi pembuatan indikator-indikator tersebut.

2.1. RUANG LINGKUP

SUSENAS 2010 dilaksanakan di Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran sampel sekitar 13.480 rumahtangga yang tersebar di seluruh Kab/Kota baik daerah perkotaan maupun pedesaan. Rumahtangga sampel sebanyak itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sampel kor sebanyak 21.568 rumahtangga. Untuk pelaksanaan Susenas 2010 di Kabupaten Karo jumlah sampel kor sebanyak 640 rumahtangga. Data yang dihasilkan dari sampel Kor disajikan sampai tingkat kabupaten/kota, sedangkan data dari sampel Modul hanya disajikan sampai dengan tingkat propinsi. Rumahtangga yang tinggal dalam blok sensus khusus dan rumahtangga khusus yang tinggal di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel. Data pokok (Kor), yaitu yang dikumpulkan dari seluruh rumahtangga yang terpilih dalam sampel ditanyakan dengan menggunakan daftar VSEN2010-K.

2.2 KERANGKA SAMPEL

Kerangka sampel yang digunakan untuk Susenas 2010 terdiri dari 3 jenis, yaitu : kerangka sampel untuk pemilihan kecamatan (khusus daerah pedesaan), kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, dan kerangka sampel untuk pemilihan rumahtangga.

Kerangka sampel untuk pemilihan kecamatan di daerah pedesaan adalah daftar kecamatan dalam setiap kabupaten/kota yang telah diurutkan menurut letak geografis.

Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perkotaan adalah daftar blok sensus yang terletak di perkotaan besar, perkotaan sedang, dan perkotaan kecil di setiap kabupaten/kota. Untuk daerah pedesaan, pemilihan blok sensus menggunakan daftar blok sensus yang terdapat dalam setiap kecamatan terpilih.

2.3 RANCANGAN SAMPEL

Sampel Susenas 2010 disiapkan untuk estimasi sampai tingkat kabupaten/kota. Rancangan sampel Susenas 2010 adalah rancangan sampel bertahap dua untuk daerah perkotaan dan rancangan sampel bertahap tiga untuk daerah pedesaan. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan pedesaan dilakukan secara terpisah.

Untuk **daerah perkotaan, tahap pertama**, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara linier sistematis sampling. Kemudian

tahap kedua, dari setiap blok sensus terpilih dipilih 10 rumahtangga juga secara linier sistematis sampling.

Untuk **daerah pedesaan, tahap pertama**, dari kerangka sampel kecamatan dipilih sejumlah kecamatan secara probability proportional to size banyaknya rumahtangga dalam kecamatan. **Tahap kedua**, dari setiap kecamatan terpilih dipilih sejumlah blok sensus secara linier sistematis sampling. Dan **tahap ketiga**, dari setiap blok sensus terpilih dipilih 10 rumahtangga juga secara linier sistematis sampling.

2.4. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data, mulai dari tahap perekaman data (data entri), pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan (editing) terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dengan jawaban yang lain.

2.5. KONSEP DAN DEFINISI

2.5.1. Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga

Rumahtangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumahtangga biasa dan rumahtangga khusus :

1). **Rumahtangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika penggunaan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu. Selain rumahtangga biasa yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, yang juga dianggap sebagai rumahtangga biasa antara lain :

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makanannya secara sendiri.
- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur asal kedua bangunan tersebut masih dalam satu segmen.
- Suatu rumahtangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang.
- Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta anggota rumahtangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya.
- Masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri.

2). **Rumahtangga khusus**, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan. lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih, **tidak dicakup dalam survei ini.**

2.5.2. Kependudukan

Kepadatan Penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Rata-rata Pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun dalam kurun waktu tertentu. Angka dinyatakan sebagai persentase dari penduduk pada tahun tertentu (dasar).

Rumusan untuk menghitung rata-rata pertumbuhan penduduk adalah :

$$P_n = P_o (1 + r)^n$$

P_n = Jumlah Penduduk pada tahun ke n

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

n = Jumlah tahun antara tahun dasar dan tahun ke n

r = laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun.

Ratio Jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap seratus penduduk perempuan.

Angka Beban tanggungan (Dependency Ratio) adalah rasio antara jumlah penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (umur 15 - 64 tahun).

2.5.3. Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk juga pendidikan yang disamakan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke SD.

Masih sekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

2.5.4. Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau hal lain. Seseorang yang

menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Sakit adalah menderita penyakit menahun (kronis) atau gangguan kesehatan yang menyebabkan aktifitas kerja terganggu. Walaupun seseorang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi bila tidak mengganggu kegiatannya sehari-hari maka ia dianggap tidak sakit.

Angka Kesakitan (morbidity rate) adalah persentase penduduk yang menderita sakit dalam satu tahun.

Angka Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun per seribu kelahiran dalam satu tahun.

Angka harapan hidup pada waktu lahir merupakan suatu perkiraan rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.

Angka kelahiran kasar menunjukkan jumlah anak yang dilahirkan 1000 penduduk dalam suatu kurun waktu tertentu.

Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah di matikan ke dalam tubuh anak balita dengan cara suntikan atau minum, dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

2.5.5. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, dan bekerja paling sedikit 1 jam selama seminggu yang lalu maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti

petani yang sedang menunggu panen, pegawai yang sedang sakit atau cuti dan pekerja bebas profesional (dukun, dalang) yang sedang menunggu pekerjaan, dan seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, dan atau mengurus rumahtangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus-putus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi).

Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen dan mogok. Termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha /perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tak dibayar.

Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (10 tahun ke atas).

Penduduk yang bekerja adalah penduduk yang sudah bekerja termasuk yang sementara tidak bekerja.

Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk **angkatan kerja** tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

2.5.6. Fertilitas

Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walau mungkin hanya beberapa saat saja seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis. Anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut **lahir mati**.

Angka Fertilitas Total (TFR) adalah jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya dengan anggapan perilaku kelahiran untuk setiap kelompok umur sama.

Metode kontrasepsi adalah cara/alat kontrasepsi yang dipakai untuk mencegah kehamilan.

2.5.7. Konsumsi/Pengeluaran

Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengeluaran untuk makanan (termasuk minuman dan rokok/tembakau) dan bukan makanan, seperti pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak, dan pesta.

Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dimakan di luar rumah dan juga termasuk minuman, tembakau, dan sirih.

Pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan mencakup seluruh jenis bukan makanan seperti perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta.

Pengeluaran rata-rata perkapita/bulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga.

2.5.8. Penduduk Miskin

Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Defenisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-

laki maupun perempuan mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermanfaat.

Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak maka kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan dan tidak terpenuhinya hak. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin tersebut.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Karo menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara penduduk miskin.

Perhitungan penduduk miskin dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dimana kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai garis kemiskinan. Garis

kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dari garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penentuan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan untuk setiap Propinsi.

2.5.9. Perumahan dan Lingkungan

Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.

Bangunan Sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/ masuk sendiri.

Luas Lantai adalah luas lantai yang di tempati dan di gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

Rumah Tangga adalah Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus serta mengurus keperluan sendiri.

Dinding adalah sisi luar batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan sendiri.

Atap adalah penutup bagian atau suatu bangunan sehingga orang mendiami di bawahnya terlindungi dari terik matahari, hujan, dan sebagainya, Untuk

bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adlah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Air dalam kemasan adalah air yang di produksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml 1 Liter, 1,5 Liter, atau 19 Liter) dan kemasan gelas ; seperti antara lain air kemasan merk Aqua, Moya, 2 Tang, Aeroz, dan VIT.

Air ledeng adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui insulasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).

Air Pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

Air Sumur/perigi adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali. Cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol. Dikategorikan sebagai sumur terlindung bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi tembok paling sedikit 0.8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur atau perigi.

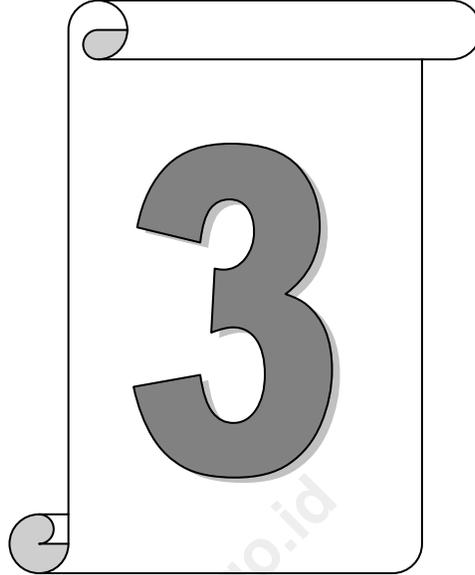
Mata Air adalah sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Closet/dudukan leher angsa adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.

Cemplung/cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhir.

WC lain adalah yang tidak mempunyai tempat duduk/jongkok termasuk yang tidak mempunyai jamban/kakus.



KEPENDUDUKAN

*Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Rasio Jenis Kelamin
Kepadatan Penduduk dan Distribusi Penduduk*

BAB III

KEPENDUDUKAN

(Hasil Sensus Penduduk 2010)

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam penanganan masalah kependudukan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Karena sangat disadari bahwa jumlah penduduk yang besar secara teoritis merupakan salah satu kekayaan dan modal dasar pembangunan. Hal ini dapat terjadi jika jumlah penduduk yang besar dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana, maka akan menjadi beban pembangunan. Aspek kependudukan yang perlu mendapat perhatian mencakup jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial harus mendapat prioritas utama karena bermuara kepada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Komposisi penduduk menurut struktur umur penduduk merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana beban tanggungan penduduk. Ketidakseimbangan komposisi antara kelompok umur produktif dengan non produktif akan menyebabkan permasalahan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Demikian juga halnya dengan distribusi atau penyebaran penduduk antar wilayah, sangat dipengaruhi oleh tingkat pemerataan hasil pembangunan. Tingkat pemerataan hasil pembangunan akan mempe- ngaruhi penyebaran dan

tingkat kepadatan penduduk. Penduduk biasanya akan melakukan migrasi ke wilayah dimana terdapat fasilitas-fasilitas yang lebih baik dibanding wilayah yang ditempati sebelumnya

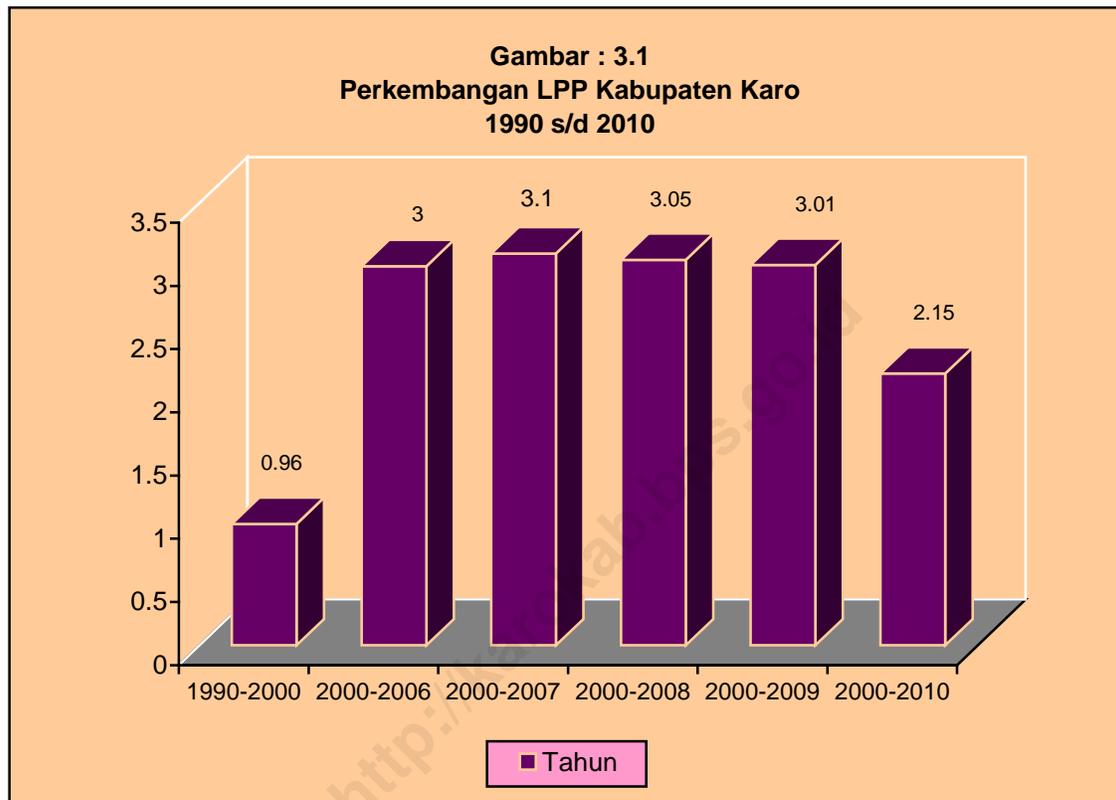
Untuk itu aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam angka meningkatkan kesejahteraan penduduk seperti: arus migrasi, angka kelahiran dan kematian. Ketiga komponen ini turut serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan politik serta pertahanan.

Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dari data kependudukan dapat dibuat berbagai perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya. Data kependudukan yang terkait diantaranya data tentang jumlah penduduk, kepadatan, dan penyebaran penduduk serta data struktur umur penduduk.

3.1. Jumlah dan Pertumbuhan penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Karo 350.960 jiwa. Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk selama 4 (empat) dekade (1990-2000) terus mengalami penurunan. Pada periode 1990-2000 rata-rata laju pertumbuhan penduduk tercatat 0,96 persen kemudian naik menjadi 2,15 persen dan 3,10 persen periode 2000-2006 dan 2000-2007. Angka laju pertumbuhan penduduk tersebut kembali turun pada

periode 2000-2008 yaitu menjadi 3,05 persen. Selanjutnya periode 2000-2009 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten karo adalah sebesar 3.01 persen dan periode 2000-2010 adalah sebesar 2.15 persen (*gambar 3.1*).



Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, permasalahan kependudukan di Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergis dengan program-program pembangunan lainnya yang dilaksanakan.

Pada tabel 3.1. ditampilkan jumlah penduduk Kabupaten Karo menurut kabupaten/kota serta laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010.

Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Tigapanah dan Kecamatan Barusjahe merupakan tiga kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak, masing-masing berjumlah 63.326 jiwa, 42.541 jiwa dan 42.541 jiwa. Sebaliknya Kecamatan Dolat Rayat adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu berjumlah 8.296 jiwa. Dilihat laju pertumbuhan penduduknya, beberapa kecamatan yang relatif tinggi adalah Kecamatan Merdeka sebesar 3,62 persen, dan Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Berastagi 3,36 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Merdeka disebabkan daerah ini menjadi pusat perkembangan ekonomi baru dan merupakan salah satu daerah agraris utama yang termasuk dalam kawasan Agropolitan di Kabupaten Karo kemungkinan menjadi daya tarik bagi penduduk kecamatan lain di sekitarnya untuk melakukan perpindahan ke daerah tersebut. Sebaliknya, beberapa daerah lain di Kabupaten Karo, laju pertumbuhan penduduknya sangat rendah antara lain Kecamatan Juhar sebesar 0,00 persen, Kecamatan Munte sebesar 0,64 persen dan Kecamatan Barusjahe 0,81 persen.

Tabel 3.1.
Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Karo, 2000-2010

Kecamatan	Tahun		Pertumbuhan (%) 2000-2010
	2000	2010	
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Mardinding	13.488	17.062	2,38
2. Laubaleng	14.268	17.713	2,19
3. Tigabinanga	16.795	19.900	1,71
4. Juhar	13.242	13.244	0,00
5. Munte	18.461	19.686	0,64
6. Kutabuluh	9.496	10.586	1,09
7. Payung	9.181	10.837	1,67
8. Tiganderket	12.059	13.178	0,89
9. Simpang Empat	16.981	19.015	1,14
10. Naman Teran	9.198	12.796	3,36
11. Merdeka	9.330	13.310	3,62
12. Kabanjahe	46.785	63.326	3,07
13. Berastagi	30.575	42.541	3,36
14. Tigapanah	22.319	29.319	2,77
15. Dolat Rayat	6.637	8.296	2,26
16. Merek	14.521	18.054	2,20
17. Barusjahe	20.377	22.097	0,81
KARO	283.713	350.960	2,15

Sumber: Kabupaten Karo, Kabupaten Karo Dalam Angka 2010 dan hasil SP2010

3.2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut.

Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Karo umumnya selalu lebih banyak dari penduduk laki-laki, yang diperlihatkan melalui rasio jenis kelaminnya. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 diketahui jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Karo 174.418 jiwa dan perempuan 176.542 jiwa atau sex ratio sebesar 98,80 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98,80 penduduk laki-laki.

Dilihat masing-masing kecamatan di Kabupaten Karo, pada tahun 2010 rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kecamatan Merek sebesar 105,28 disusul Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Lau Baleng yaitu masing-masing sebesar 103,95 dan 101,10.

Hal ini dapat diduga karena daerah ini umumnya adalah daerah pertanian yang lebih menuntut peran laki-laki. Sebaliknya Kecamatan Kabanjahe adalah kecamatan dengan sex ratio paling kecil yaitu 95,83 disusul kecamatan lainnya adalah Barusjahe. Kondisi ini menunjukkan bahwa umumnya penduduk laki-laki di wilayah tersebut cenderung pergi keluar untuk bekerja atau bersekolah.

Tabel 3.2
Jumlah dan Persentase Penduduk
Menurut Kecamatan, dan Jenis Kelamin

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mardingding	8.526	8.536	17.062	99,88
2. Laubaleng	8.905	8.808	17.713	101,10
3. Tigabinanga	9.915	9.985	19.900	99,30
4. Juhar	6.592	6.652	13.244	99,10
5. Munte	9.739	9.947	19.686	97,91
6. Kutabuluh	5.241	5.345	10.586	98,05
7. Payung	5.364	5.473	10.837	98,01
8. Tiganderket	6.434	6.744	13.178	95,40
9. Simpang Empat	9.515	9.500	19.015	100,16
10. Naman Teran	6.522	6.274	12.796	103,95
11. Merdeka	6.682	6.628	13.310	100,81
12. Kabanjahe	30.989	32.337	63.326	95,83
13. Berastagi	21.206	21.335	42.541	99,40
14. Tigapanah	14.519	14.800	29.319	98,10
15. Dolat Rayat	4.108	4.188	8.296	98,09
16. Merek	9.259	8.795	18.054	105,28
17. Barusjahe	10.902	11.195	22.097	97,38
JUMLAH	174.418	176.542	350.960	98,80

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Karo

3.3. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah masih timpangnya penyebaran penduduk antar daerah, sehingga kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang

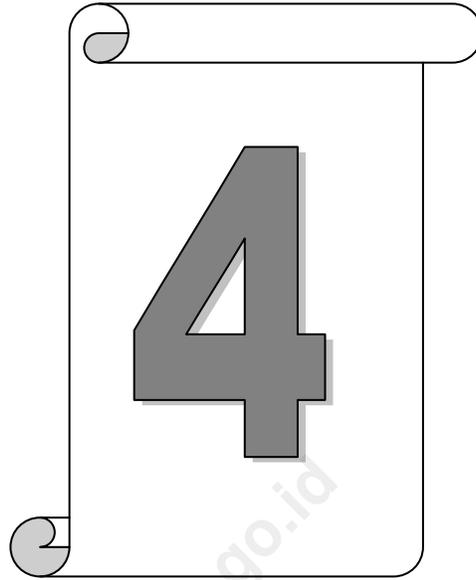
dibutuhkan oleh penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah kelurahan. Kecamatan Kabanjahe sebagai ibu kota Kabupaten Karo yang luasnya sebesar 44,17 km² adalah kota terpadat yang setiap kilometer persegi nya ditempati 1418,28 jiwa/ km². Disusul Kecamatan Berastagi, dengan luas hanya 30,50 km² dari luas daratan Kabupaten Karo memiliki kepadatan penduduk mencapai 1.394,79 jiwa/km². Pada umumnya daerah kelurahan mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi. Kondisi ini disebabkan daerah perkotaan memiliki fasilitas yang lebih lengkap, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang untuk melakukan migrasi. Sebaliknya, tingkat kepadatan penduduk yang rendah tersebar di wilayah Kecamatan di Kabupaten Karo. Kecamatan Kutabuluh hanya dihuni oleh 54 jiwa per kilometer persegi, disusul Kecamatan Juhar dan Mardingding yaitu 61 jiwa per kilometer persegi dan 64 jiwa per kilometer persegi.

Tabel : 3.3
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan,

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)	DISTRIBUSI (PERSEN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mardinding	17.062	63,88	4,86
2. Laubaleng	17.713	70,12	5,05
3. Tigabinanga	19.900	124,08	5,67
4. Juhar	13.244	60,60	3,77
5. Munte	19.686	156,69	5,61
6. Kutabuluh	10.586	54,09	3,02
7. Payung	10.837	229,40	3,09
8. Tiganderket	13.178	151,89	3,75
9. Simpang Empat	19.015	203,41	5,42
10. Naman Teran	12.796	145,71	3,65
11. Merdeka	13.310	301,34	3,79
12. Kabanjahe	63.326	1418,28	18,04
13. Berastagi	42.541	1394,79	12,12
14. Tigapanah	29.319	156,92	8,35
15. Dolat Rayat	8.296	257,24	2,36
16. Merek	18.054	143,85	5,14
17. Barusjahe	22.097	172,58	6,30
JUMLAH	350.960	164,98	100,00

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Karo



PENDIDIKAN

*Angka Partisipasi Sekolah
Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Angka Buta Huruf
Rasio Murid, Guru dan Sekolah*

BAB IV PENDIDIKAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dijelaskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28 dan pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Oleh sebab itu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan amanat yang harus dilaksanakan bangsa ini karena pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif sehingga pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Millenium Development Goals (MDGs)* yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang

memadai dan juga ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, dimana banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Ditengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian disusul dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. Kebijakan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program diluar pendidikan formal, diantaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan beberapa kebijakan pembangunan daerah, salah satunya adalah kebijakan pembangunan sektor pendidikan yang diarahkan dalam rangka penciptaan SDM yang berkualitas dan mampu berperan serta dalam melaksanakan pembangunan berbagai sektor dan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui :

- a. Peningkatan kualitas pengajaran dan kualitas kelulusan pendidikan formal serta
- b. Penanggulangan kekurangan guru di setiap wilayah/kecamatan.

Kondisi pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka melek huruf.

4.1. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem pendidikan. Adakalanya penduduk usia 7 – 12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat SD.

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Karo terus meningkat. Pada usia 7-12 tahun meningkat dari 98,67 persen tahun 2009 menjadi 99,14 persen pada tahun 2010. Kemudian pada kelompok umur 13-15 meningkat dari 92,06 persen menjadi 97,28

persen pada tahun yang sama. Demikian juga pada kelompok umur 16-18 meningkat dari 67,28 persen menjadi 70,46 dan kelompok umur 19-24 tahun 2009 sebesar 5,55 persen meningkat menjadi 6,76 persen tahun 2010.

Berdasarkan hasil susenas 2010, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status sekolah, terlihat bahwa lebih dari separoh penduduk Kabupaten Karo tidak besekolah lagi, yaitu 77,20 persen (76,53 Persen untuk penduduk laki-laki dan 77,89 Persen untuk penduduk perempuan). Adapun penduduk yang masih sekolah sekitar 20,00 persen (22,00 Persen penduduk laki-laki dan 19,05 persen untuk perempuan), sedangkan penduduk yang tidak sekolah/belum pernah sekolah masih ada sekitar 2,18 Persen (1,34 persen untuk laki-laki dan 3,06 persen untuk penduduk perempuan). Dari gambar tersebut terlihat bahwa keterlibatan penduduk laki-laki dalam dunia pendidikan masih dominan dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 4.1
 Persentase Penduduk
 Yang masih sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2010

AKTIVITAS PENDIDIKAN MENURUT KELOMPOK UMUR	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDUDUK 7-12 TAHUN	99.12	99.16	99.14
PENDUDUK 13-15 TAHUN	98.14	96.19	97.28
PENDUDUK 16 – 18 TAHUN	74.45	64.46	70.46
PENDUDUK 19-24 TAHUN	6.88	3.74	5.55
PENDUDUK 7-15 TAHUN	98.80	98.37	98.59
PENDUDUK 7-24 TAHUN	71.09	72.34	71.66

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

Tabel 4.2
 Persentase Penduduk Usia 10 tahun Ke atas
 Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin 2010

STATUS PENDIDIKAN	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH	1,34	3,06	2,18
MASIH SEKOLAH			
- SD	7,32	8,83	8,06
- SMTP	8,21	5,37	6,81
- SMTA	6,04	4,63	5,34
- Diploma/Sarjana	0,56	0,22	0,39
TIDAK BERSEKOLAH LAGI	76,53	77,89	77,20
JUMLAH	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

4.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu penghambat dalam percepatan pembangunan, karena pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hakekat pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Pendidikan yang rendah dapat dirasakan sebagai penghambat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pendidikan mutlak diperlukan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan penduduk melalui proses pembangunan. Hal seperti ini sejalan dengan hakekat dari tujuan pendidikan itu sendiri, yakni merupakan usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Keadaan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang dimiliki di Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang pada umumnya di tingkat SD sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi. Hasil Susenas 2010 menunjukkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang dimiliki mulai tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi sebesar 81,69 persen, selebihnya sekitar 18,30 persen adalah mereka yang berpendidikan SD kebawah (Tabel 4.3).

Tabel 4.3.
 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas
 Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin
 2010

IJASAH TERTINGGI YANG DIMILIKI	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
TIDAK PUNYA IJASAH	15,65	21,05	18,30
SD/MI/ SEDERAJAT	27,28	22,87	25,11
SLTP/MTS/SEDERAJAT/KEJURUAN	24,91	21,35	23,16
- SMU/MA/SEDERAJAT	22,14	24,77	23,43
- SM KEJURUAN	5,08	4,52	4,81
- Diploma I/II	0,20	0,91	0,55
- Diploma III	1,50	2,19	1,84
- Diploma IV/Sarjana	3,23	2,35	2,79
- S2/S3	-	-	-
JUMLAH	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kab. Karo, Susenas 2010

Penduduk usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijazah SD/MI sebanyak 25,11 persen. Sekitar 23,16 persen penduduk usia 10 tahun keatas yang mempunyai ijazah SLTP/MTs/ sederajat, dan sekitar 28,24 yang memiliki ijazah SMU/MA/SM Kejuruan sederajat. Dari satu sisi, dari setiap 100 orang berusia 10 tahun ke atas

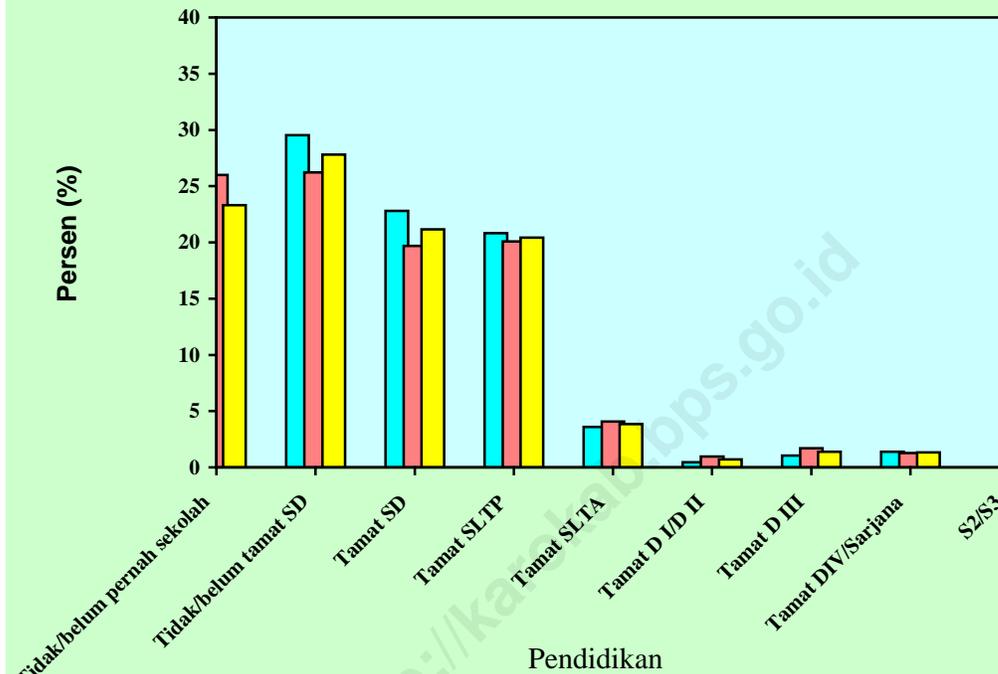
hanya sekitar 5,18 persen orang diantaranya telah meluluskan pendidikannya dan memiliki ijazah dari D-I atau lebih.

Keadaan ini dapat dianggap masih rendah dan oleh karena itu upaya untuk meningkatkan derajat pendidikan di Kabupaten Karo masih perlu terus menerus ditingkatkan. Jika dibandingkan antara penduduk menurut jenis kelamin, maka terlihat bahwa kondisi pendidikan penduduk laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan, khususnya tamatan SLTA ke atas. Penduduk laki-laki yang memiliki ijazah SD/MI sekitar 27,28 persen, sedangkan penduduk perempuan sekitar 22,87 persen (Gambar 4.1).

Penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijazah SLTP/MTs sekitar 24,91 persen sedangkan penduduk perempuan sekitar 21,35 persen penduduk usia 10 tahun ke atas. Penduduk laki-laki yang telah tamat dari SLTA/MA/SM sekitar 27,22 persen, sedangkan untuk penduduk perempuan lebih tinggi yaitu 29,29 persen.

Untuk pendidikan tinggi sekitar 4,93 persen laki-laki usia 10 tahun ke atas yang telah menyandang ijazah/diploma D-I sampai dengan Sarjana (S-1 atau lebih), sedangkan penduduk perempuan hanya sekitar 5,45 persen.

Gambar 4.1.
Persentase Penduduk Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki
Tahun 2010



4.3. Angka Buta Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis akan mendorong meningkatnya peran aktif penduduk dalam proses pembangunan. Secara persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan

menulis di Kabupaten Karo dapat dikatakan rendah. Menurut hasil susenas 2010, persentase penduduk yang melek huruf sebanyak 98,26 persen dan buta huruf 1,74 Persen.

Tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf dapat di jadikan salah satu indikator tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Selanjutnya tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

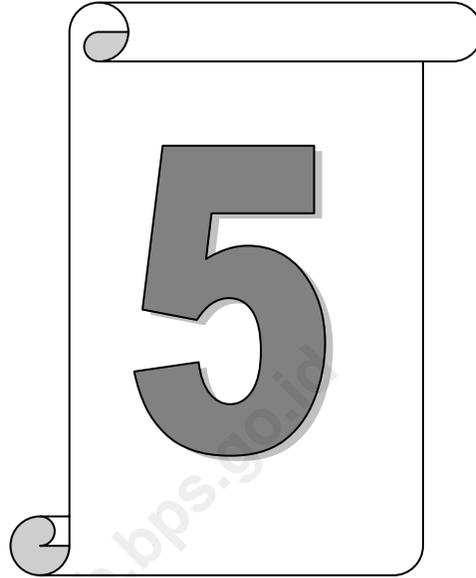
Jika diperhatikan dari kepandaian membaca dan menulis penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf latin 99,26 persen dan perempuan 97,22 persen. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf lain laki-laki sebesar 0,47 persen sedang perempuan 1,04 persen. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis huruf latin dan lainnya laki-laki sebesar 3,20 persen dan perempuan sebesar 2,99. Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang buta huruf laki-laki sebesar 0,74 persen dan perempuan sebesar 2,78 persen.

Tabel 4.4

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Buta Huruf
Menurut Kelompok Kepandaian Membaca dan Menulis, dan Jenis Kelamin

KEPANDAIAN MEMBACA DAN MENULIS (1)	PERSENTASE		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
Huruf Latin	99.26	97.22	98.26
Huruf Lain	0.47	1.04	0.75
Huruf Latin dan lainnya	3.20	2.99	2.10
Buta huruf	0.74	2.78	1.74
JUMLAH	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Karo, Susenas 2010.



KESEHATAN

*Angka Kesakitan
Penolong Kelahiran
Angka Kematian Bayi
Pemberian Asi
Angka Harapan Hidup*

BAB V KESEHATAN

Seperti halnya dengan pendidikan, kesehatan harus dipandang sebagai investasi di masa mendatang dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat

kesehatan masyarakat diantaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut

Arah dan kebijaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Karo secara garis besar adalah mengupayakan peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat, peningkatan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan.

Indikator umum yang biasa digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kesakitan, Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Penolong Kelahiran, Angka Kematian Bayi, Pemberian ASI dan Imunisasi serta Angka Harapan Hidup.

5.1. Angka Kesakitan

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Persentase penduduk yang mengobati sendiri selama sebulan yang lalu. Angka persentase yang dihasilkan pada Susenas merupakan hasil pengolahan dari pertanyaan kepada responden tentang pengobatan sendiri.

Dari jawaban responden yang melakukan pengobatan sendiri dengan cara memakai obat tradisional yang menjawab "Ya" sebanyak 47,45 persen dan sisanya menjawab "Tidak". Dengan cara memakai obat modern yang menjawab "Ya" sebanyak 91,22 persen dan sisanya menjawab "Tidak". Dengan cara lainnya yang menjawab "Ya" sebanyak 6,54 persen dan selebihnya menjawab "Tidak".

Salah satu indikator derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan. Banyaknya penduduk di Kabupaten Karo yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan sebelum pencacahan dan komposisi yang mempunyai keluhan dan jenis keluhan kesehatan pada tahun 2010 terlihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.
 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan
 Jenis Keluhan Kesehatan dalam Sebulan, 2010

JENIS KELUHAN KESEHATAN	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Panas	6.73	5.93	6.34
2 Batuk	14.11	11.28	12.73
3 Pilek	14.93	11.64	13.33
4 Asma/Sesak Napas	0.80	1.21	1.00
5 Diare/Buang-buang air	1.28	1.56	1.42
6 Sakit Kepala/Pusing	1.27	1.06	1.17
7 Sakit Gigi	1.17	0.85	1.01
8 Lainnya	5.25	6.79	6.06
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	23.92	22.75	23.35

Sumber : BPS Kabupaten Karo, Karo Dalam Angka 2010

Banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan pada tahun 2010 yang lalu adalah sebesar 23,35 persen, dengan persentase sedikit berbeda antara penduduk laki-laki (23,92 persen) dan penduduk perempuan (22,75 persen). Keluhan kesehatan yang paling banyak dialami penduduk, menurut hasil Susenas 2010 adalah Pilek (13,33 persen), Batuk (12,73 persen) dan Panas (6,34 persen).

Jika dibandingkan urutan jenis keluhan kesehatan penduduk menurut jenis kelamin, maka tidak terdapat perbedaan, yaitu Pilek menempati urutan teratas

keluhan kesehatan yang dialami penduduk laki-laki (14,93 persen), batuk (14,11 persen) menempati urutan kedua dan panas (6,73 persen). Demikian juga penduduk perempuan yang mengalami Pilek (11,64 persen), disusul dengan batuk (11,28 persen), dan panas (5,93 persen).

Tabel 5.2 berikut ini menggambarkan komposisi penduduk Kabupaten Karo yang sakit selama sebulan yang lalu (sebulan sebelum pencacahan Susenas 2010) menurut jumlah hari sakit.

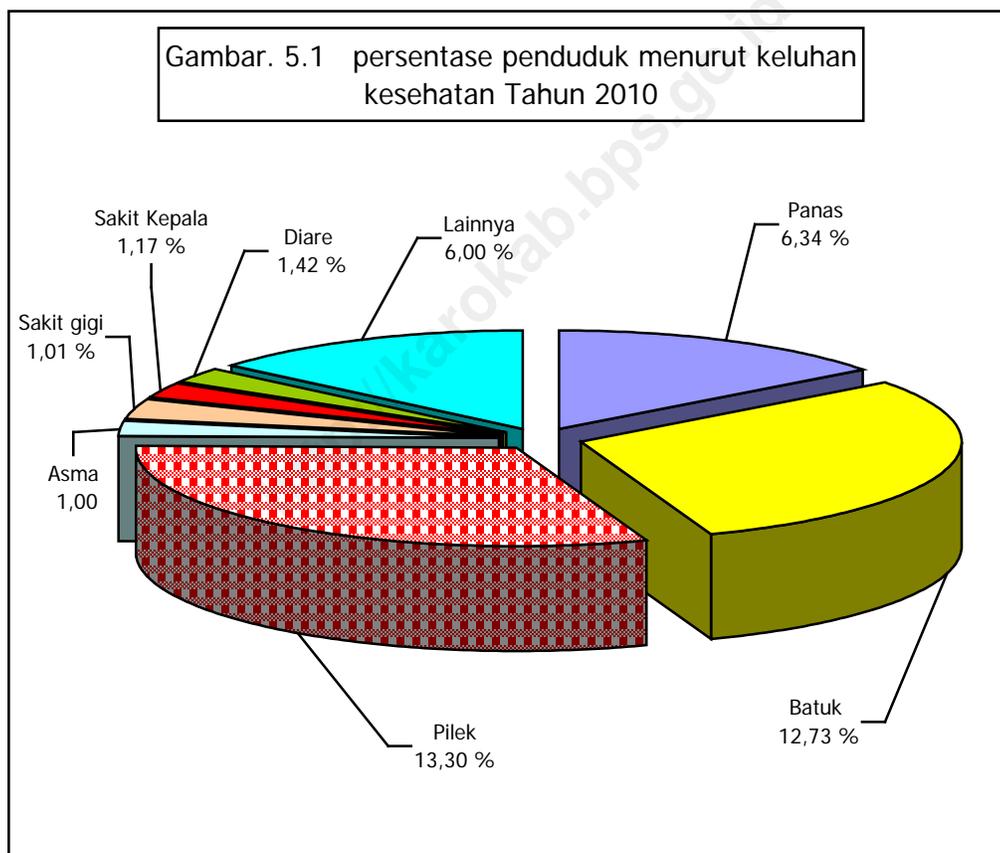
Tabel 5.2.

Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Hari Sakit, 2010

Jumlah Hari Sakit (hari)	P e n d u d u k		
	Laki-laki	Perempuan	Lk+Pr
[1]	[2]	[3]	[4]
1 - 3	66.29	65.56	65.95
4 - 7	14.17	18.51	16.17
8 - 14	6.30	4.35	5.40
15 - 21	3.28	1.92	2.65
22 - 30	9.96	9.66	9.82
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

Berdasarkan Susenas 2010, banyaknya persentase penduduk Kabupaten Karo yang menderita sakit dengan jumlah hari sakit kurang dari 4 hari dalam sebulan adalah 65,95 persen, antara 4 - 7 hari sebesar 16,17 persen, 8 -14 hari sebesar 4,40 persen, 15 - 21 hari sebesar 2,65 persen dan antara 22-30 hari sebesar 9,82 persen. Penduduk laki-laki dan perempuan lama hari sakit kurang dari 4 hari dalam sebulan yang lalu pada saat pencacahan lebih dominan dibandingkan kelompok jumlah hari sakit lainnya, yaitu 66,29 persen dan 65,56 persen.



5.2. Penolong Kelahiran

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga media seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu

Penolong kelahiran balita pertama yang terbanyak secara berurutan di Kabupaten Karo Tahun 2010 adalah bidan (88,13 persen), dokter (10,15 persen), dukun (0,59 persen), famili (1,13 persen), Dukun (2,77 persen) dan lainnya (1,19 persen). Penolong kelahiran balita terakhir yang terbanyak secara berurutan di Kabupaten Karo Tahun 2006 adalah bidan (88,95 persen), dokter (7,50 persen), dukun (2,37 persen), famili dan tenaga medis masing-masing (0,40 persen), dan lainnya (0,39 persen).

Rendahnya peran dokter dalam penolong kelahiran memang tidaklah mengherankan, hal ini terjadi kerana minimnya tenaga dokter yang ada dan juga

cukup besarnya biaya yang dikeluarkan apabila proses kelahiran ditangani oleh dokter. Peranan “dukun” sudah tidak terlalu besar lagi dalam membantu kelahiran Balita. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat daerah ini terhadap pertolongan tenaga medis dalam proses kelahiran. Disamping itu masyarakat sudah mulai menyadari akan arti pentingnya kesehatan Balita.

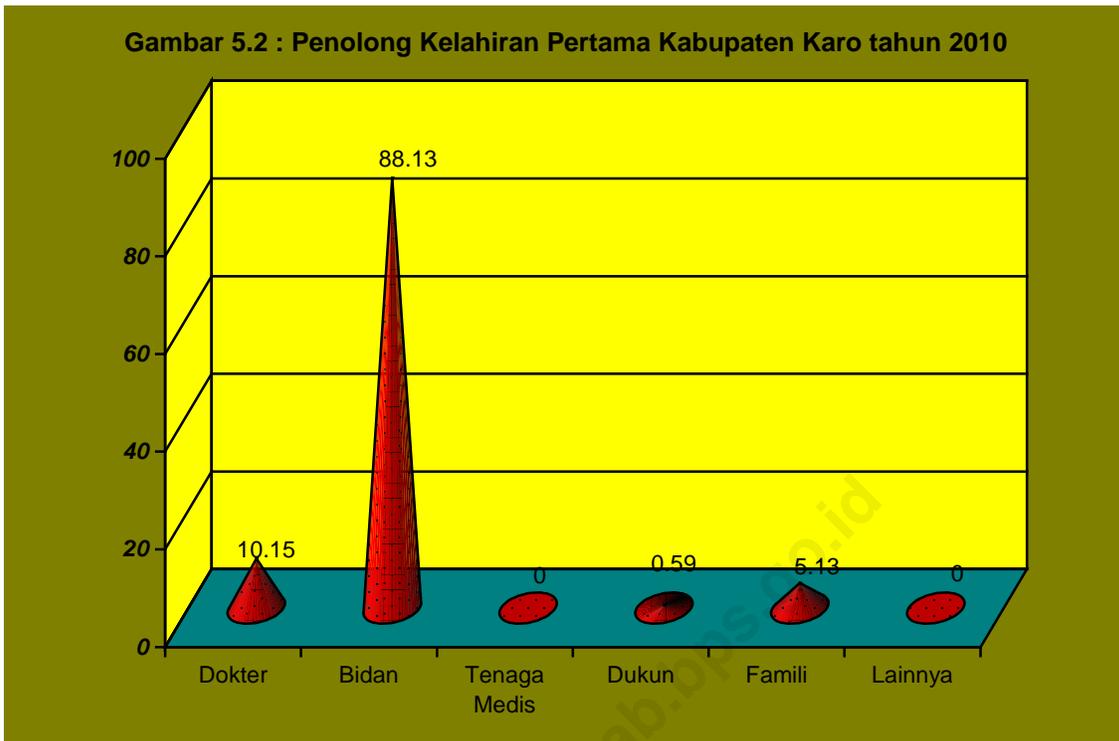
Membbaiknya kondisi penolong kelahiran balita dalam persalinannya merupakan buah kebijakan pemerintah yang telah menempatkan bidan-bidan yang berstatus PNS maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) di hampir seluruh pedesaan di Kabupaten Karo. Secara lengkap persentase balita menurut penolong kelahiran terakhir di Kabupaten Karo pada tahun 2010 disajikan pada tabel 5.3.

Tabel 5.3.
 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Balita
 di Kabupaten Karo, 2010

Penolong Kelahiran	Persentase Balita (%)	
	Pertama	Terakhir
(1)	(2)	(3)
1. Dokter	10.15	11.03
2. Bidan	88.13	88.38
3. Perawat/Tenaga Medis	0.00	0.00
4. Dukun	0.59	0.59
5. Famili	1.13	0.00
6. Lainnya	0.00	0.00

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

Gambar 5.2 : Penolong Kelahiran Pertama Kabupaten Karo tahun 2010



5.3. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR)

Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dijadikan ukuran tingkat kesehatan penduduk secara umum. Angka ini biasanya diperkirakan melalui cara atau metode tertentu dari data hasil sensus/survei. Kematian bayi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga, keadaan sosial ekonomi keluarga, sistem nilai adat istiadat, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan yang tersedia. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan kesehatan dimasa mendatang perlu terus ditingkatkan.

Mosley dan Chen (1984) berpendapat bahwa ada 5 (lima) buah faktor utama yang mempengaruhi Angka Kematian Bayi (IMR). Kelima faktor tersebut adalah faktor maternal seperti umur saat persalinan, jarak kelahiran, status gizi ibu, faktor pengendalian kesehatan baik pencegahan (preventif) maupun pengobatan (kuratif). Faktor kontaminasi lingkungan seperti penyebaran bakteri lewat air, makanan, udara, serangga, faktor status gizi bayi dan faktor pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan kesehatan di masa mendatang perlu terus ditingkatkan. Dengan pembangunan yang dilaksanakan tersebut, baik pembangunan sarana kesehatan maupun perbaikan tingkat hidup penduduk juga akan menyebabkan penurunan tingkat kematian.

IMR di Kabupaten Karo selama periode 2003-2006 terus mengalami penurunan. Berdasarkan angka hasil Susenas 2005, IMR tahun 2003 diperkirakan sebesar 19,0 dan tahun 2004 turun menjadi 18,6, tahun 2005 turun menjadi 16,6, tahun 2006 turun lagi menjadi 15,68. Angka ini relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka Sumatera Utara yang telah mencapai 33,12 pada tahun 2006. Sementara target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam visi Indonesia Menuju Sehat 2010 sebesar 40,0. Sebagai bahan pembandingan IMR per 1000 kelahiran di Kabupaten Karo dan Sumatera Utara disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Perkembangan Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Karo dan Sumatera Utara
2001-2007

Tahun	Kabupaten Karo	Sumatera Utara
(1)	(2)	(3)
2001	21,00	39,40
2003	19,00	37,00
2004	18,60	36,70
2005	16,60	34,20
2006	15,68	33,12
2007	11,50	26,90

Sumber : BPS Kabupaten Karo, Susenas 2001-2007

5.4. Pemberian ASI

Faktor yang mempengaruhi IMR selain kesehatan ibu, juga masa persalinan, pemberian ASI dan makanan tambahan serta pemberian imunisasi. Oleh karena itu, lamanya masa pemberian ASI dan lengkapnya pemberian imunisasi perlu diperhatikan.

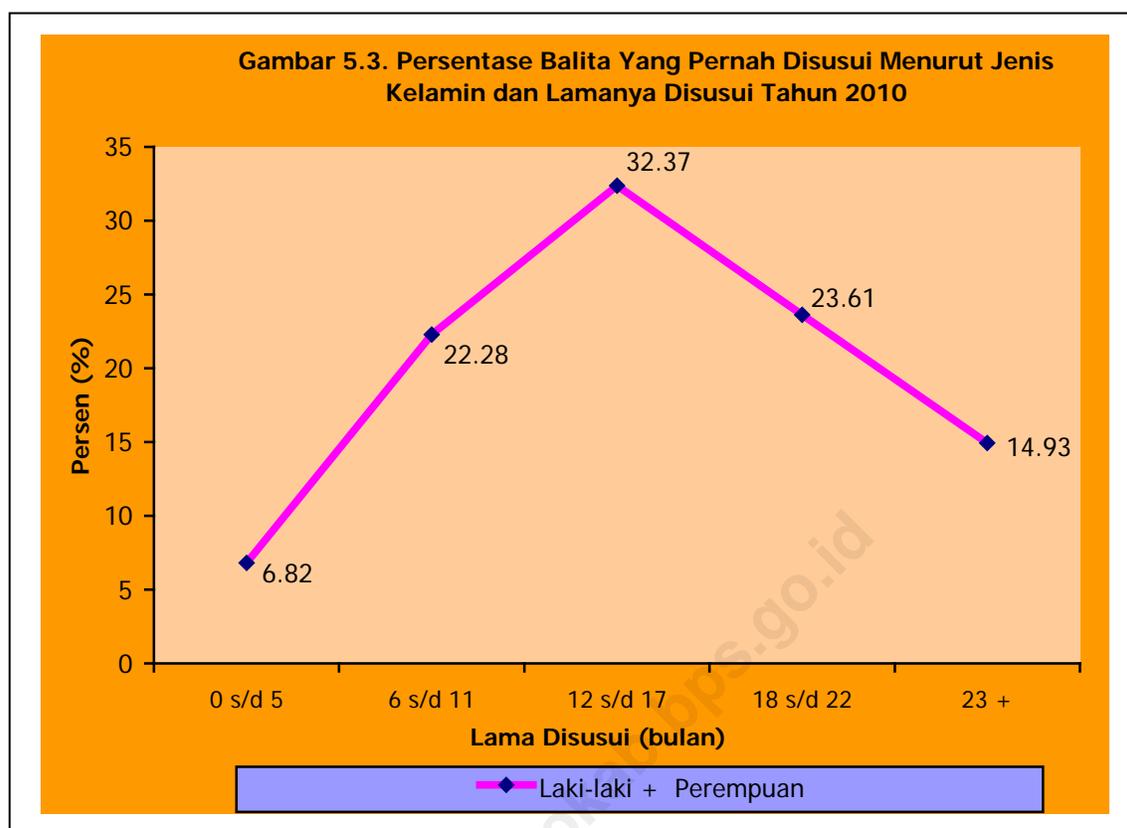
Hasil Susenas 2010 (Tabel 5.5) menunjukkan lama pemberian ASI bagi balita di Kabupaten Karo, paling dominan antara 12 – 17 bulan yaitu sekitar 32,37 persen, antara 18 sampai dengan 23 bulan sebanyak 23,61 persen, disusul 6 sampai 11 bulan sebanyak 22,28 persen, disusul 23 + bulan bulan sebanyak 8,19 persen. Umur 1 sampai 5 bulan sebanyak 6,51 persen. Balita yang diberi asi kurang dari 6 bulan seberar 0,31 persen

Tabel 5.5

Persentase Balita yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Disusui dan Jenis Kelamin Balita di Kabupaten Karo, 2010

Lama Disusui (Bulan)		Persentase Balita
		Lk + Pr
(1)	(2)	(3)
1	0 Bulan	0,31
2	1 - 5 Bulan	6,51
3	6 - 11 Bulan	22,28
4	12 - 17 Bulan	32,37
5	18 - 23 Bulan	23,61
6	23 + Bulan	14,93
J u m l a h		100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010



5.5. Angka Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan secara yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan sejak Pelita I antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diperkirakan sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk

memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Sejalan dengan penurunan AKB, maka AHH menunjukkan kenaikan (lihat Gambar 5.4).

Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo pada tahun 2010 mencapai 72,19 tahun. Bila dibandingkan dengan AHH Sumatera Utara, yang juga baru mencapai 69,50 tahun, maka AHH penduduk Kabupaten Karo lebih tinggi 3 tahun. Keadaan ini memang diakibatkan oleh masih cukup tingginya angka kematian bayi dan cukup minimnya sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

The United Nations Developmen Programe (UNDP) menetapkan bahwa manusia berkualitas adalah manusia yang angka harapan hidupnya mencapai 85 tahun.

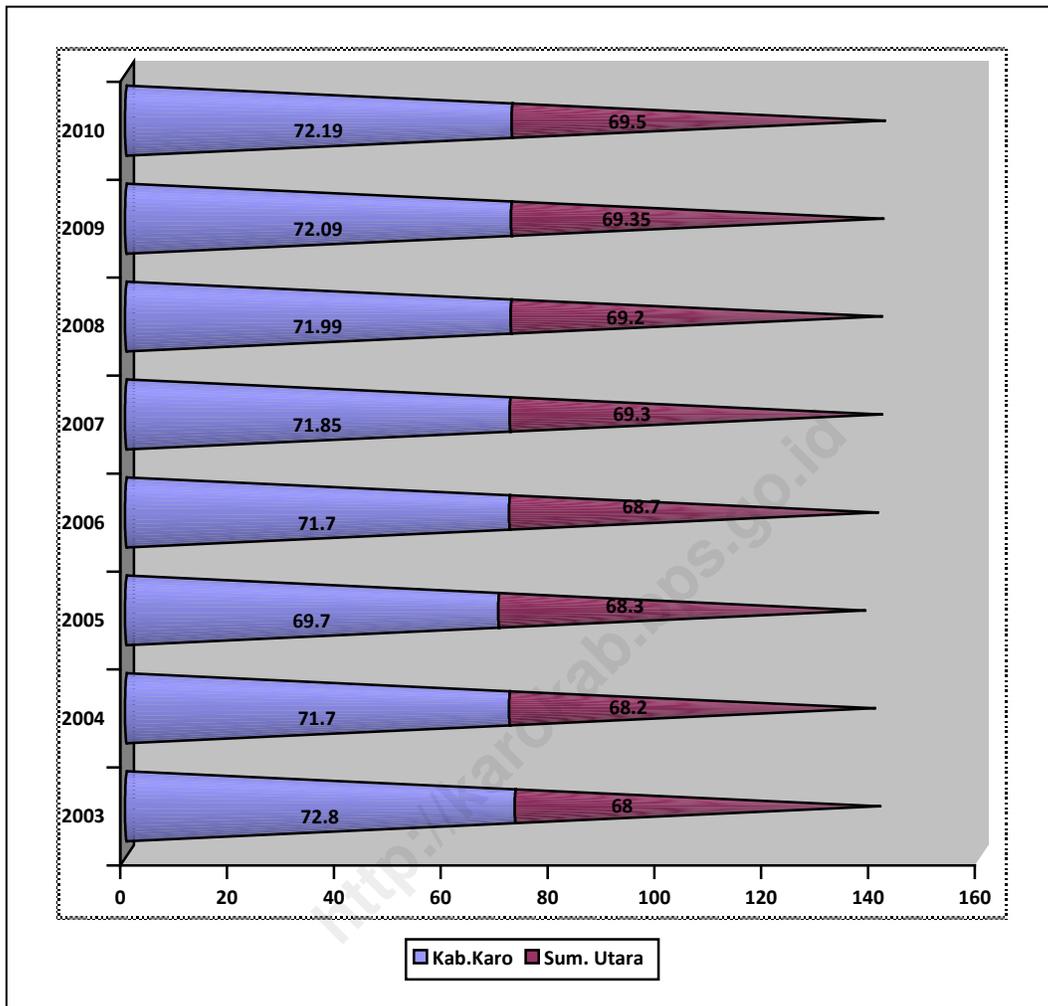
Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan faktor membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial-ekonomi yang selanjutnya memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup.

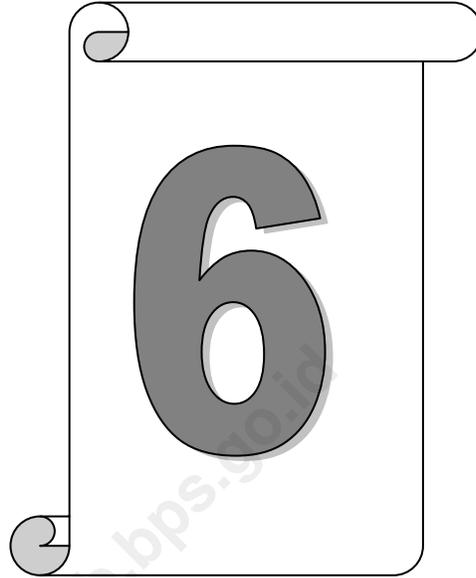
Tabel 5.6
Angka Harapan Hidup Penduduk
Kabupaten Karo dan Sumatera Utara
tahun 1999 – 2010

Tahun	Kabupaten Karo	Sumatera Utara
(1)	(2)	(3)
1999	72,00	66,30
2001	72,40	67,00
2003	72,80	68,00
2004	70,10	68,20
2005	71,70	68,30
2006	71,80	68,70
2007	71,85	69,30
2008	71,99	69,20
2009	72,09	69,35
2010	72,19	69,50

Sumber : BPS Kabupaten Karo, Susenas 1999-2010

Gambar 5.4. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2003 - 2010





FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

*Usia Perkawinan Pertama
Angka Kelahiran Total
Wanita Berumur 10 Tahun Keatas Yang Pernah Kawin
Keluarga Berencana*

BAB VI FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Fertilitas merupakan salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan terjadinya perubahan penduduk selain kematian dan migrasi. Fertilitas menyangkut banyaknya anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan sangat erat kaitannya terhadap beban rumahtangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumahtangganya. Bagi rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera. Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya yaitu usia antara 15-49 tahun. Hal ini disebabkan kemungkinan wanita melahirkan pada usia tersebut cukup besar.

Hal lain yang cukup penting diperhatikan dalam melihat tingkat kelahiran ini adalah usia wanita saat perkawinan pertama. Semakin muda usia saat perkawinan pertamanya, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum matangnya rahim wanita muda untuk memproduksi anak, atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama, semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

6.1. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan. Pertama, menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi berstatus kawin. Kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Dalam kaitan dengan sub bagian ini, defenisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan berulang kali sampai dengan masa menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang wanita menikah, maka semakin panjang usia repro- duksinya dan semakin besar pula kemungkinannya mempunyai anak.

Tabel 6.1 menampilkan persentase wanita 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut umur perkawinan pertama. Secara umum, sebagian besar usia saat perkawinan pertama adalah 19-24 tahun (53,24 persen). Persentase wanita pernah kawin yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 17 tahun lebih sedikit yaitu 4,11 persen.

Tabel 6.1

Persentase Wanita Berusia 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, Kabupaten Karo 2010

Usia Perkawinan Pertama	Kabupaten Karo	Sumatera Utara
(1)	(2)	(4)
10-16	4,11	7,93
17-18	18,28	17,00
19-24	53,24	54,86
25 - 34	23,13	19,34
35+	1,24	0,87
Jumlah	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

6.2. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/ TFR*)

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumahtangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumahtangganya. Bagi rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang lemah,

maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.

Tabel 6.2
Angka Kelahiran Total (TFR)
Kabupaten Karo dan Sumatera Utara
2003-2008

Tahun	TFR	
	Kabupaten Karo	Sumatera Utara
(1)	(2)	(3)
2003	2,61	3,03
2004	2,45	2,96
2005	2,41	2,53
2006	2,37	2,47
2007	2,35	2,52
2008	2,31	2,49

Sumber : BPS Kabupaten Karo, Susenas 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008

Total Fertility Rate (TFR) Sumatera Utara pada tahun 2006 sebesar 2,47 kemudian naik menjadi 2,52 pada tahun 2007. Pada tahun 2008 turun kembali menjadi sebesar 2,49. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelahiran adalah usia perkawinan pertama terutama wanita, karena semakin muda seorang wanita menikah maka kemungkinan waktu untuk melahirkan semakin panjang. Selain itu usia perkawinan juga

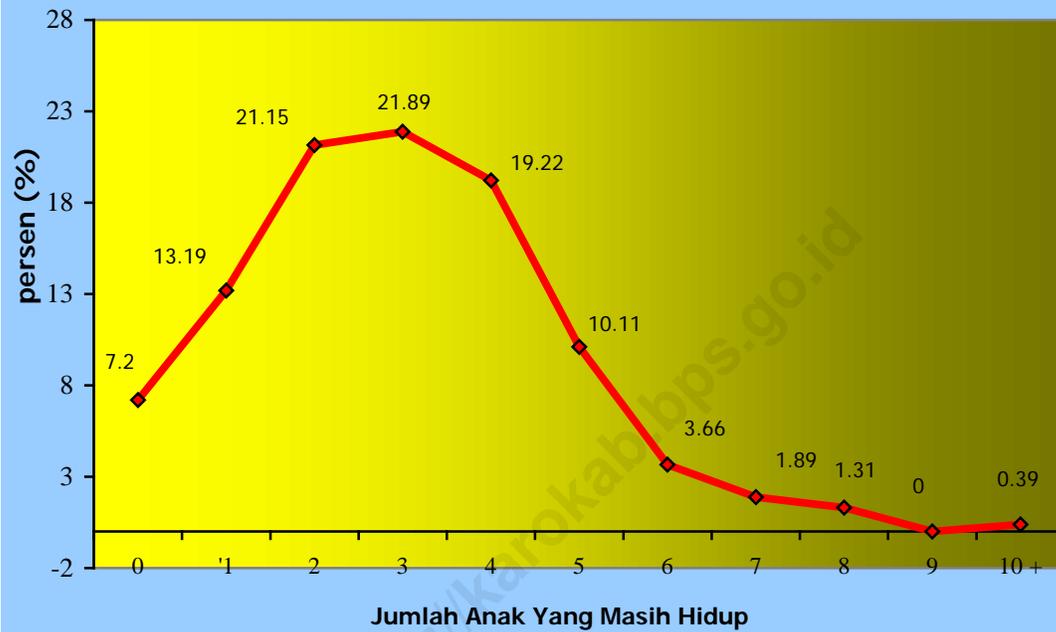
berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri, dan terhadap anak yang dilahirkan. Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum siapnya fisik dan mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama (*melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB*), semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan

6.3 Wanita Berumur 10 tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak yang Masih Hidup

Jumlah anak yang ideal berdasarkan program keluarga berencana (*KB*) yang dianjurkan oleh pemerintah adalah keluarga dengan 1 sampai dengan 3 orang anak. Gambar 6.1 menunjukkan bahwa di Kabupaten Karo, tahun 2010 menurut data Susenas ada sekitar 21,89 persen wanita berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin mempunyai 3 orang anak yang masih hidup. Selanjutnya, sekitar 21,15 persen yang mempunyai 2 anak, 19,22 persen dengan 4 orang anak, dan sekitar 13,19 persen yang mempunyai 1 orang anak yang masih hidup.

Persentase jumlah anak yang masih hidup dari wanita berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin dengan jumlah 3 orang anak atau kurang seperti yang diidealkan oleh program Keluarga Berencana sekitar 21,89 persen.

Gambar 6.1.
Persentase Wanita 10 Tahun Ke atas Yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak Yang Masih Hidup, 2010



Tabel 6.3
 Persentase Wanita Usia 10 Tahun Keatas Yang Pernah Kawin
 Menurut Jumlah Anak Yang Dilahirkan Hidup, Masih Hidup, dan Sudah Meninggal

JUMLAH ANAK	PERSENTASE		
	Anak Lahir Hidup	Anak Masih Hidup	Anak Sudah Meninggal
(1)	(2)	(3)	(4)
0	7,20	7,20	92,75
1	12,71	13,19	5,57
2	20,59	21,15	1,50
3	21,51	21,89	0,00
4	18,39	19,22	0,19
5	10,04	10,11	0,00
6	5,51	3,66	0,00
7	1,98	1,89	0,00
8	1,13	1,31	0,00
9	0,19	0	0,00
10+	0,76	0,39	0,00
JUMLAH	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

6.4. Keluarga Berencana

Penurunan tingkat fertilitas di Kabupaten Karo telah berlangsung cukup lama, namun yang menarik untuk dibahas adalah perubahan yang terjadi setelah dimulainya program keluarga berencana nasional. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan percepatan yang semakin melambat. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami dan isteri, dengan usia istri antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan, sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, perlu dilihat tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Tabel 6.4

Persentase Wanita Berumur 15 - 49 Tahun Berstatus Kawin

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo 2010

Menurut Penggunaan Cara/Alat BerKB Tahun 2010

Penggunaan Cara/Alat KB	Persentase
(1)	(2)
Sedang Menggunakan KB	35,02
Tidak Menggunakan KB Lagi	31,22
Tidak Pernah Menggunakan KB	33,76

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin, yang pernah menggunakan/memakai alat/cara KB pada tahun 2010 di Kabupaten Karo adalah sebesar 35,02 persen. Berarti sekitar separoh wanita usia subur (PUS) di Kabupaten Karo telah melaksanakan program pemerintah dalam mensukseskan program KB.

Dari proporsi wanita usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB tersebut yang terbanyak diantaranya menggunakan alat/cara Suntik sebanyak 53,48 persen, Pil 18,39 persen, Susuk KB 8,24 persen, MOW/Tubektomi 9,59 persen, MOP/Vesektomi 2,81 persen, IUD/AKDR/Spiral 2,41 persen. Selengkapnya persentase wanita berstatus kawin dan masih menggunakan alat/cara KB yang digunakan pada tahun 2010 di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 6.5. Tingginya persentase pemakaian alat/cara suntikan secara keseluruhan,

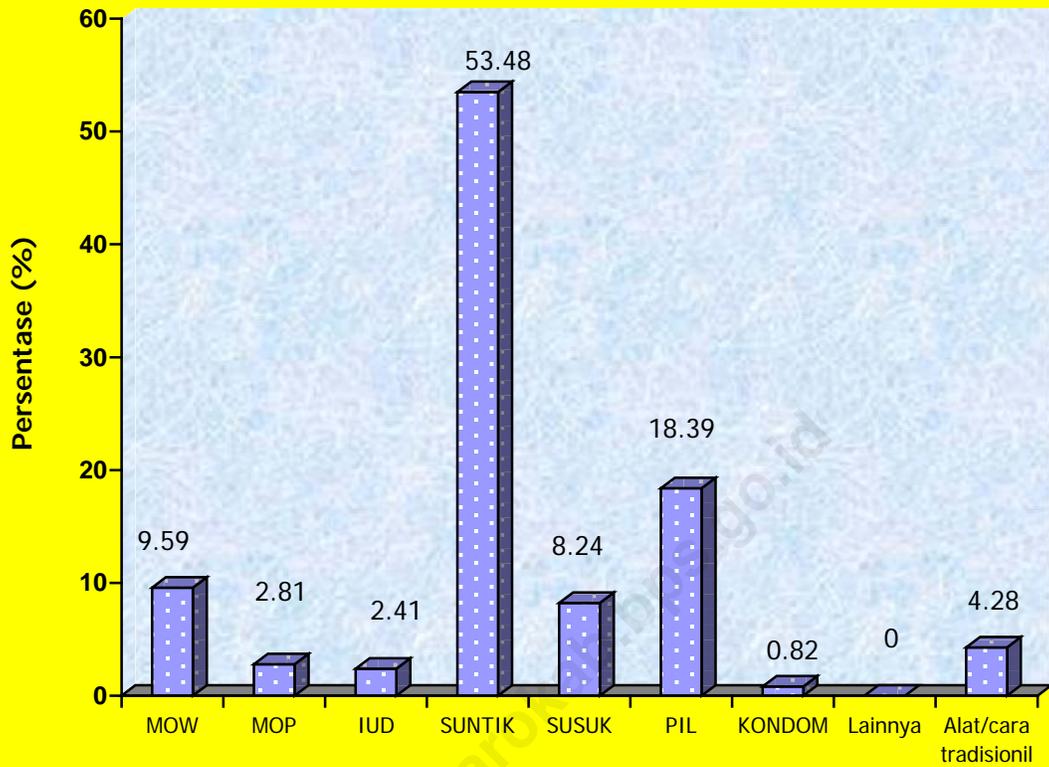
disebabkan karena alat/cara tersebut sangat disukai, praktis relatif murah dan mudah di akses peserta KB.

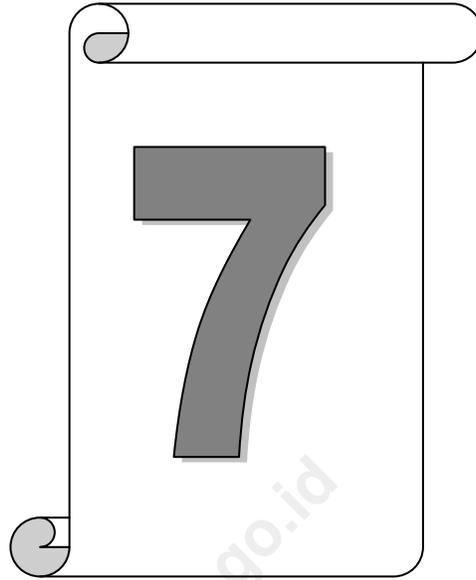
Tabel 6.5
 Persentase Wanita Yang Berstatus Kawin, dan Masih Menggunakan Alat/
 Cara KB Menurut Alat/Cara KB Yang Digunakan

ALAT / CARA KB	Persentase
(1)	(2)
1 MOW/Tubektomi	9,59
2 MOP/Vasektomi	2,81
3 AKDR/IUD	2,41
4 Suntikan	53,48
5 Susuk KB	8,24
6 P i l	18,39
7 Kondom	0,82
8 Lainnya	0,00
9 Alat/Cara Tradisional	4,28
JUMLAH	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

Gambar 6.2 Persentase Jenis Alat KB yang Digunakan Tahun 2010





KEMISKINAN, POLA KONSUMSI DAN IPM

*Kemiskinan
Pola konsumsi
Pengeluaran Menurut Golongan Pengeluaran
Pembangunan Manusia*

BAB VII

KEMISKINAN, POLA KONSUMSI, IPM

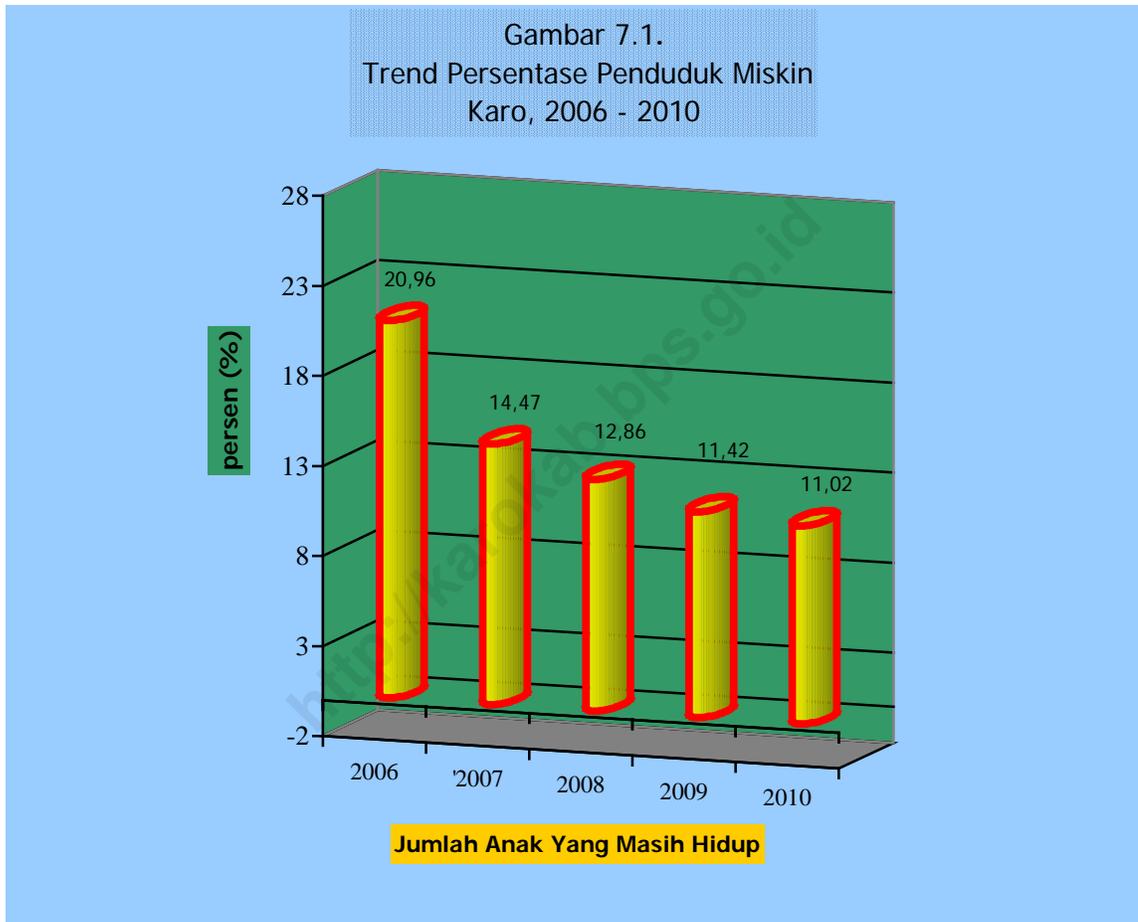
7.1. Kemiskinan

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kcal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori perkapita perhari.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di

Kabupaten Karo menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2008 persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo sekitar 12,86 persen kemudian turun menjadi 11,42 persen, pada tahun 2009. Angka ini kembali turun menjadi 11,02 persen pada tahun 2010.



7.2. Pola Konsumsi

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk

hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumahtangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Kabupaten Karo terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2010 sebesar Rp.564.929,- yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp.375.964,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp.188.964,-. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran diperuntukan untuk konsumsi makanan, berarti sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan). Jika di analisis lebih lanjut sekitar 66,55 persen diantaranya digunakan untuk pengeluaran untuk konsumsi makanan dan 33,45 persen untuk bukan makanan.

Tabel 7.1
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan
Menurut Jenis Konsumsi Pengeluaran Per Kapita/bulan

Jenis Konsumsi	Kabupaten Karo		Sumatera Utara	
	Pengeluaran/ Kapita/Bulan	Persentase Pengeluaran/Kapita/Bulan	Pengeluaran/ Kapita/Bulan	Persentase/ Pengeluaran/ Kapita/Bulan
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
Makanan	375.964	66,55	321.539	57,45
Bukan Makanan	188.964	33,45	238.138	42,55
JUMLAH	564.929	100	559.678	100

Sumber : BPS Kabupaten Karo. Susenas 2010

Secara umum persentase pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Karo lebih tinggi dibanding dengan Sumatera Utara yaitu masing-masing sebesar 66,55 persen dan 57,45 persen.

7.3 Persentase Pengeluaran Menurut Golongan Pengeluaran per kapita/Bulan

Selain pertambahan pendapatan/pengeluaran, persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan juga dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, dimana semakin tinggi persentase

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo 2010

pengeluaran untuk bukan makanan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 7.2
 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita/bulan Tahun 2010

GOLONGAN PENGELUARAN	PERSENTASE PENDUDUK
(1)	(2)
< 30.000	0.00
30.000 – 39.999	0.00
40.000 – 59.999	0.00
60.000 - 79.999	0.00
80.000 - 99.999	0.00
100.000 - 149.999	0.00
150.000 - 199.999	0.20
200.000 - 299.999	7.10
300.000 - 399.999	18.52
400.000 – 499.999	16.04
500.000 +	58.15
JUMLAH	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Karo. Susenas 2010

7.4. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia. Indeks ini dinilai mampu mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*)

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo 2010

penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Konsep Pembangunan Manusia berbeda dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Fakta menunjukkan bahwa banyak daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik namun memiliki kualitas pembangunan manusia yang rendah. Hal ini mungkin terjadi karena tingkat pertumbuhan PDRB yang tinggi di suatu daerah tersebut belum tentu dinikmati langsung oleh masyarakatnya.

Untuk melihat perkembangan IPM di daerah, maka tingkatan status pembangunan manusia dibedakan 4 (empat) kriteria yaitu tinggi, menengah atas, menengah bawah dan rendah. Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah, hal ini mengindikasikan kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah, berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.

**Tabel 7.3.
Tingkatan Status dan Kriteria Pembangunan Manusia**

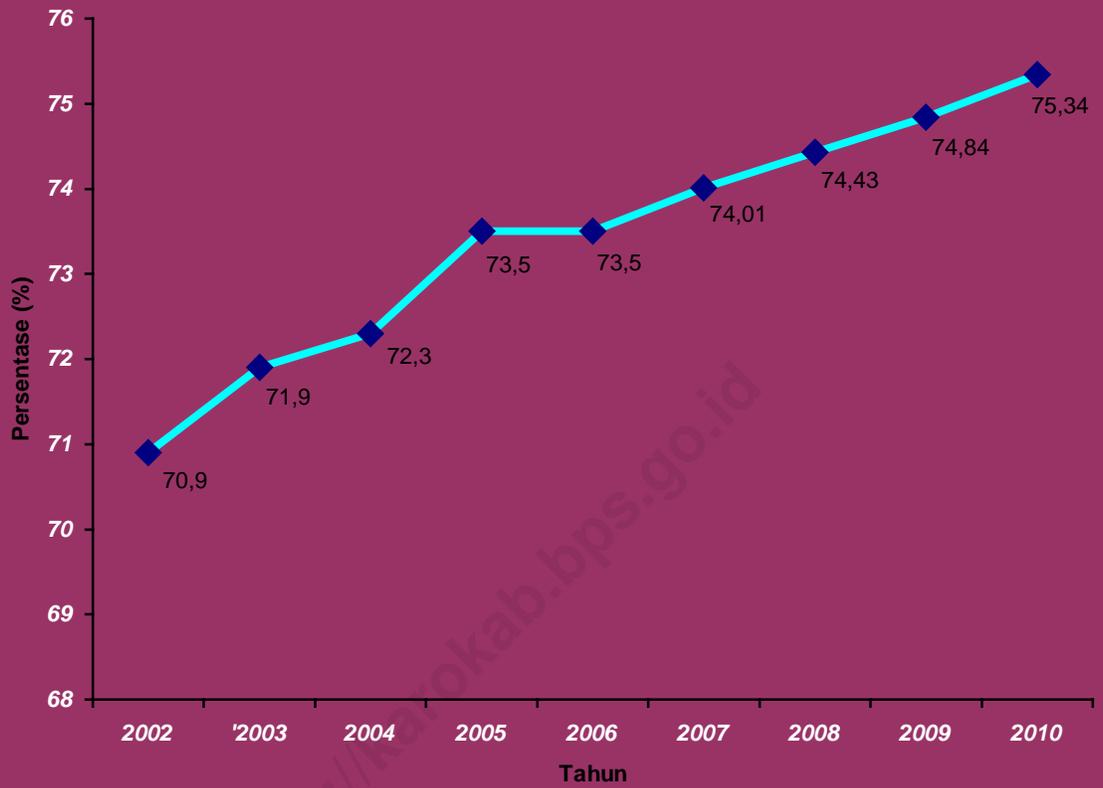
Tingkatan Status	Kriteria
(1)	(2)
Rendah	$IPM < 50$
Menengah Bawah	$50 \leq IPM < 66$
Menengah Atas	$66 \leq IPM < 80$
Tinggi	$IPM \geq 80$

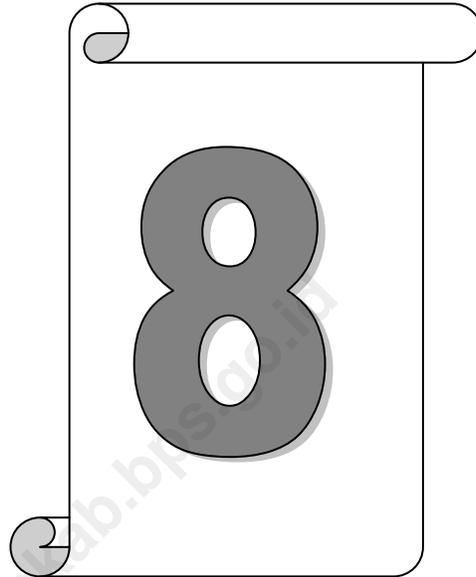
Sumber : Laporan Pembangunan Manusia

Selama periode 2002-2010 kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Karo terus meningkat dan berada pada status menengah atas.

Kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Karo mulai menunjukkan kondisi yang menunjukkan perbaikan sejak tahun 2002. Pada tahun 2002, IPM Kabupaten Karo mencapai 70,9 tahun 2003 mencapai 71,9 tahun 2004 mencapai 72,3 tahun 2005 mencapai 73,5 tahun 2006 73,5 tahun 2007 mencapai 74,01 tahun 2008 mencapai 74,43 tahun 2009 mencapai 74,84 dan tahun 2010 mencapai 75,34. Kenaikan ini dapat dipahami, mengingat dampak dari investasi di sektor kesehatan dan pendidikan.

Gambar 7.2 Perbandingan IPM Karo 2002 - 2010





KETENAGAKERJAAN

Penduduk Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Lapangan Pekerjaan
Status Pekerjaan

BAB VIII KETENAGAKERJAAN

Masalah ketenagakerjaan merupakan permasalahan dan isu yang kompleks serta terus berkembang, sehingga tidak hanya menjadi masalah daerah namun telah menjadi masalah nasional bahkan internasional. Masalah ketenagakerjaan harus membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha, pekerja itu sendiri dan pihak lainnya. Saat ini pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja

Secara teori tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Dalam analisis tenaga kerja, bagian yang sangat penting mendapat perhatian adalah angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Pengangguran disini didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan saat

sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha atau juga orang yang sudah merasa putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumahtangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Karo diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping penambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka.

Selain pengangguran terbuka (*disguised unemployed*) dan pengangguran terselubung yaitu mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal (*under employed*) juga merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut banyak terjadi di Kabupaten Karo yang antara lain sebagai konsekuensi dari masyarakat bercorak agraris dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas serta semakin banyak calon tenaga kerja baru baik yang berpendidikan maupun tidak.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Karo dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

8.1 Penduduk Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (*10 tahun ke atas*) digolongkan sebagai:

- (i) angkatan kerja, bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan, dan
- (ii) bukan angkatan kerja, bila mereka bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berarti semakin besar keterlibatan penduduk usia 10 tahun ke atas dalam pasar kerja.

Tabel 8.1.

Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2008- 2010

Kegiatan	Tahun		
	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	199.349	203.118	221.646
- Bekerja	187.033	198.939	218.202
- Pengangguran	12.316	4.179	3.444
Bukan Angkatan Kerja	35.202	38.900	37.683
Jumlah	234.551	242.018	259.329
TPAK (%)	84,99	83,93	85,47
TPT (%)	6,18	2,06	1,55

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2008 - 2010

8.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada tahun 2010, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Karo adalah 259.329 orang yang terdiri dari 221.646 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 37.683 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa TPAK di Kabupaten Karo tahun 2010 sebesar 85,47 persen, artinya bahwa pada tahun 2009 sebanyak 85,47 persen penduduk usia kerja di Kabupaten Karo siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Jika dilihat perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Karo menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2008, TPAK Kabupaten Karo 84,99 persen, kemudian turun menjadi 83,93 persen tahun 2009 dan kembali naik pada tahun 2010 menjadi 85,47 persen.

8.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2010 di Kabupaten Karo sebesar 1,55 persen. Pada tahun

2009 sebesar 2,06 persen, dan tahun 2008 sebesar 6,18 persen. Kecenderungan menurunnya tingkat pengangguran terbuka ini tentunya sinyal positif bagi kesejahteraan di Kabupaten Karo. Disadari bahwa, semakin tinggi pengangguran akan berakibat pada meningkatnya kerawanan sosial.

Hal yang cukup menarik jika mencermati TPT di Kabupaten Karo umumnya di bawah 10 persen. Hal ini dapat dipahami bahwa di Kabupaten Karo pada umumnya merupakan daerah pertanian, dan tidak sulit untuk bekerja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Berbeda di perkotaan dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, penduduk usia kerja umumnya lebih selektif untuk mencari pekerjaan, selain karena sudah terbatasnya lahan pertanian.

8.4. Lapangan Pekerjaan

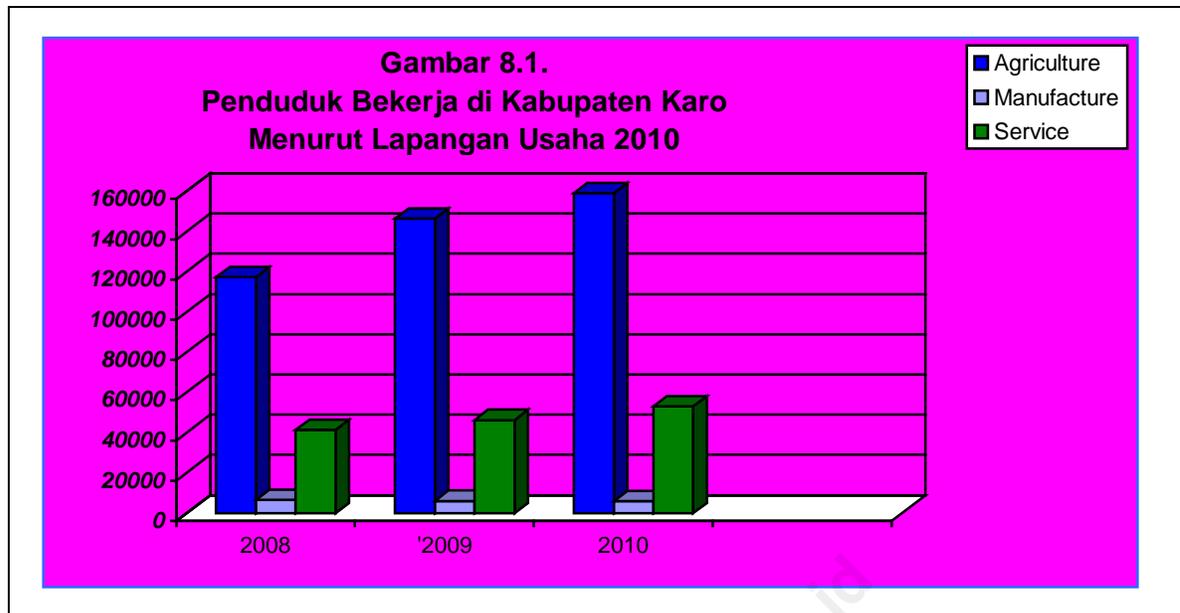
Dalam memudahkan analisis pada sektor perekonomian, maka lapangan pekerjaan utama yang terdiri dari sembilan sektor dibagi dalam tiga kelompok utama, yaitu sektor A (Pertanian), sektor M (Pertambangan/penggalian, Industri, Listrik, Gas & Air dan Bangunan), serta sektor S (Angkutan, Perdagangan, Keuangan dan Jasa) atau ketiga kelompok tersebut dapat dikelompokkan sebagai sektor Primer, Sekunder dan Tertier.

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karo. Perkembangan 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2008, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karo 2010*

sebanyak 117.360 penduduk Kabupaten Karo bekerja di sektor ***Agriculture***/pertanian, kemudian disusul sektor ***Service*** (Angkutan, Perdagangan, Keuangan dan Jasa) sebesar 41.486 persen dan sisanya 6.643 persen pada sektor ***Manufacture*** (Pertambangan/penggalian, Industri, Listrik Gas dan Air serta Bangunan) seperti yang terlihat pada gambar 8.1.

Pada tahun 2009 dan 2010 kondisinya relatif sama, dimana pertanian masih mendominasi walaupun menunjukkan sedikit penurunan yaitu 146.545 penduduk pada tahun 2009 dan 159.241 penduduk tahun 2010, disusul sektor ***Service*** sebesar 46.293 penduduk dan 52.982 penduduk pada tahun 2009 dan 2010 serta sektor ***Manufacture*** sebesar 6.101 penduduk dan 5.979 penduduk pada tahun 2009 dan 2010.

Besarnya peran sektor Pertanian dalam perekonomian Kabupaten Karo disebabkan daerah ini memang merupakan potensi sektor pertanian, seperti pertanian tanam pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan karena didukung oleh lahan yang cukup luas dan subur.



8.5. Status Pekerjaan

Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relative '*tradisional*'. Sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern, lebih banyak buruh atau karyawan dan pengusaha dengan buruh tetap. Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama dikalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

Pada umumnya penduduk Kabupaten Karo yang bekerja

sebagai pekerja tak dibayar. Pada tahun 2010 sebanyak 79.474 orang pekerja di Kabupaten Karo berstatus pekerja keluarga kemudian disusul berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar 72.600 orang dan 18.092 orang berusaha sendiri.

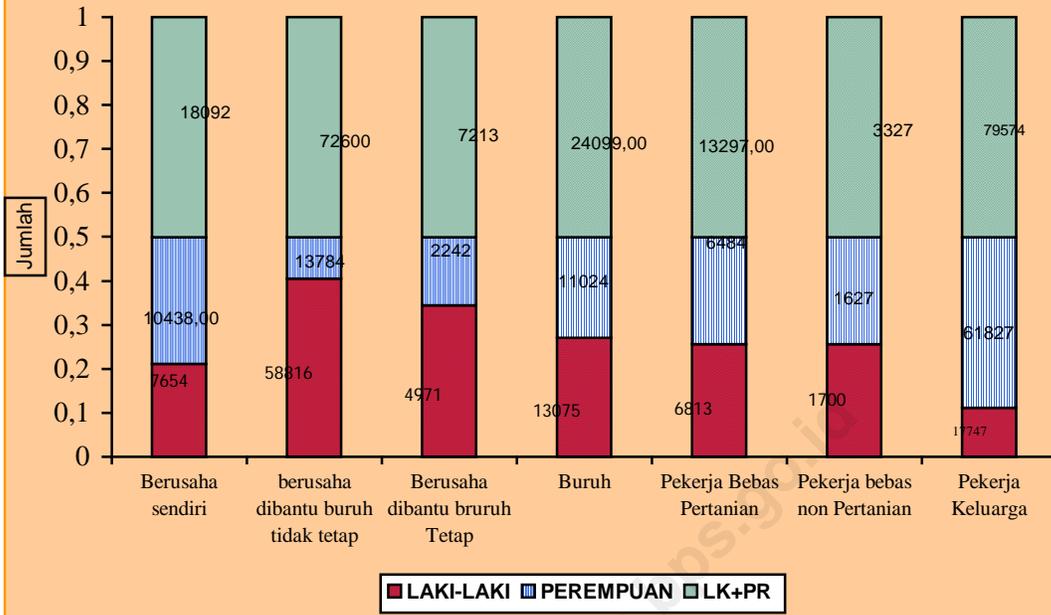
Tabel 8.2.
Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karo, 2010

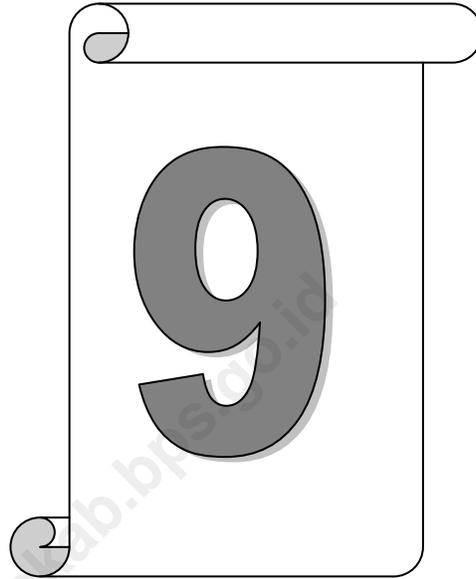
Status Pekerjaan	2010		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	7.654	10.438	18.092
2. Berusaha dibantu ART atau buruh tidak tetap	58.816	13.784	72.600
3. Berusaha dengan buruh tetap	4.971	2.242	7.213
4. Buruh/Karyawan	13.075	11.024	24.099
5. Pekerjaan Bebas dipertanian	6.813	6.484	13.297
6. Pekerja Bebas Non Pertanian	1.700	1.627	3.327
7. Pekerja Keluarga	17.747	61.827	79.574
Jumlah	110.776	107.426	79.574

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

Gambar 8.2.

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin 2010





PERUMAHAN

Kondisi Rumah
Fasilitas Rumah

BAB IX PERUMAHAN

Salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan adalah papan (perumahan). Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya. Tingginya harga rumah akibat permintaan yang terus meningkat, dan tingkat pendapatan penduduk Indonesia yang relatif rendah, menyebabkan banyak rumahtangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

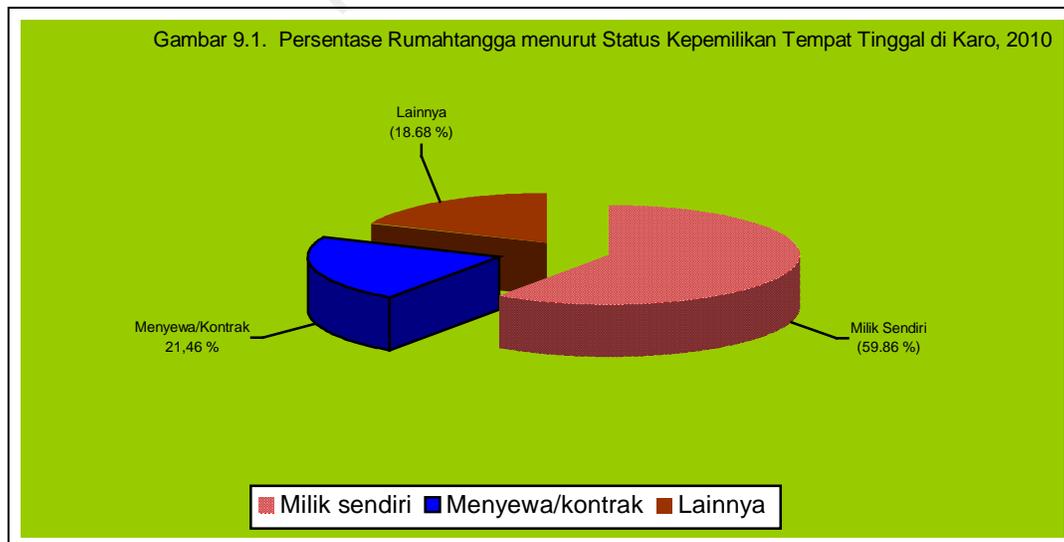
Oleh sebab itu, perumahan merupakan salah satu persoalan utama yang masih memerlukan penanganan cukup serius, baik mengenai kelengkapan sarana perumahan maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya. Rumah yang layak sebaiknya mampu memenuhi syarat kesehatan bagi penghuninya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan status kelayakan sebuah rumah diantaranya adalah luas lantai yang ditempati, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan kepemilikan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti listrik, air minum, dan tempat pembuangan air besar. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan

perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumahtangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain, program kesehatan lingkungan yang bertujuan menjaga, membentuk/mencapai dan melestarikan keadaan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman juga dilakukan. Hal ini disadari bahwa perumahan tidak hanya sekedar tempat berteduh tetapi merupakan cermin kehidupan masyarakat, sehingga perlu terwujudnya rumah sehat yang dapat memberikan rasa nyaman dan nikmat bagi penghuninya.

9.1. Kondisi Rumah

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumahtangga terhadap rumah yang ditempatinya.



Sekitar dua per tiga rumahtangga yang ada di Kabupaten Karo (59,86 %) mendiami rumah milik sendiri, dan sebanyak 21,46 % rumahtangga masih menyewa/mengontrak, sedangkan sisanya (18,68 %) mendiami rumah dinas/bebas sewa/rumah orang tua/famili dan lainnya. Persentase rumahtangga yang menyewa/mengontrak masih cukup besar sehingga perlu mendapat perhatian. Mereka yang masih menyewa/mengontrak adalah rumahtangga baru atau mereka yang belum mampu memiliki rumah sendiri karena keterbatasan pendapatannya.

Tingkat kelayakan kondisi tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kondisi rumah tinggalnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan rumah antara lain jenis lantai (bukan tanah), jenis dinding (tembok) dan jenis atap (asbes/seng/genteng). Ketiga indikator ini dianggap mempengaruhi keadaan kesehatan anggota rumahtangga yang juga berdampak pada tingkat kesejahteraannya. Secara umum, semakin besar persentase nilai indikator tersebut berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

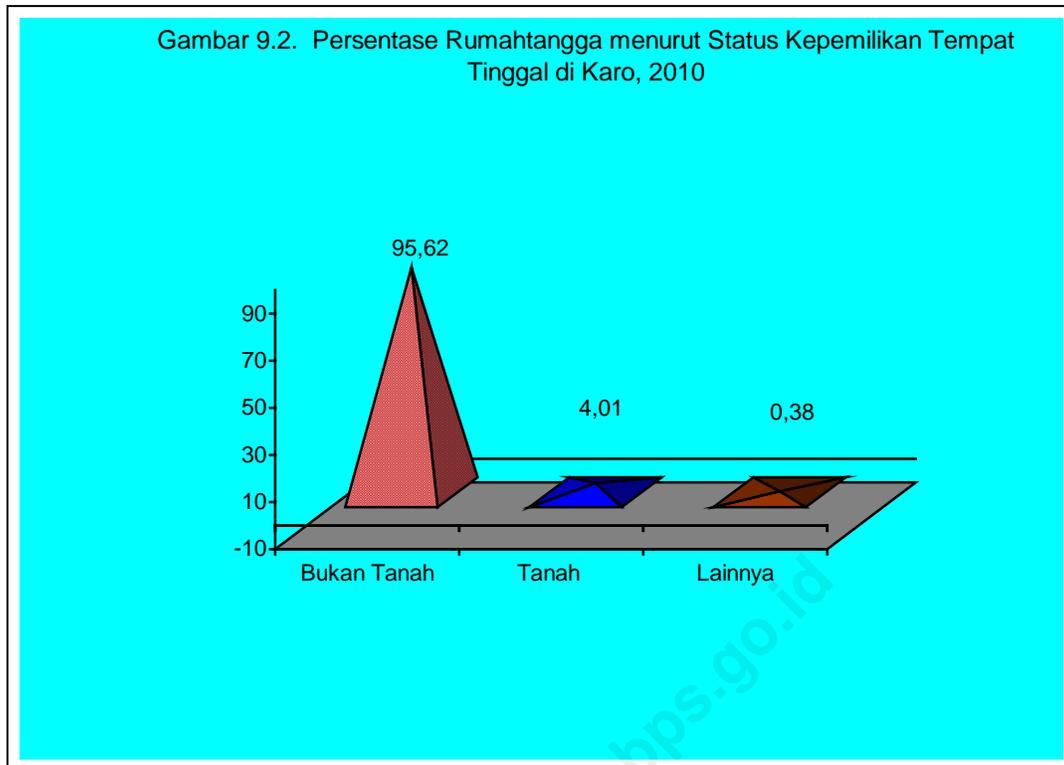
Tabel. 9.1. Kondisi Perumahan Kabupaten Karo, 2010

URAIAN	2010
(1)	(2)
1. Rata-rata luas lantai perkapita (M ²)	19,90
2. Rumahtangga dengan lantai bukan tanah (%)	95,62
3. Rumahtangga dengan dinding rumah Tembok (%)	43,35
4. Rumahtangga dengan atap beton, genteng, sirap dan seng (%)	97,90

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi perumahan di Kabupaten Karo menunjukkan perbaikan. Hal ini diperlihatkan dengan semakin meningkatnya indikator kualitas perumahan. Indikator pertama yang dapat dilihat adalah luas lantai perkapita. Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumahtangga, karena harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumahtangga, maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumahtangga. Pada tahun 2010 rata-rata rumahtangga di Kabupaten Karo memiliki luas lantai per kapita sekitar 19,90 M².

Selain luas lantai, jenis lantai terluas merupakan indikator kesejahteraan. Jenis lantai terbuat dari tanah tentunya tidak memenuhi syarat kesehatan, karena dapat menjadi bersarangnya kuman-kuman penyakit. Pada gambar 9.2. diketahui bahwa sekitar 4,01 persen rumahtangga di Kabupaten Karo masih tinggal di rumah dengan lantai tanah. Kondisi yang memprihatinkan ini masih menjadi pemandangan di daerah perdesaan, sebab masih 4,39 persen rumahtangga tinggal di rumah yang lantainya kurang sehat.



Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan hunian sebuah rumah adalah jenis dinding dan atap. Pada tahun 2010, sekitar 43,35 persen rumahtangga tinggal di rumah dengan dinding tembok. Selain tembok bahan lain yang cukup dominan adalah kayu yakni sekitar 52,54 persen. Hampir seluruhnya atau sekitar 97,5 persen rumahtangga tinggal di rumah dengan atap seng, beton dan genteng.

9.2. Fasilitas Rumah

Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisinya tapi juga dari ketersediaan fasilitas penunjang perumahan yang utama diantaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum,

dan kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumahtangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rumahtangga pengguna listrik semakin meningkat. Pada tahun 2010 sebanyak 97,44 persen rumahtangga di Kabupaten Karo menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN.

Tabel 9.2.
Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Karo, 2010

LUAS LANTAI	2010
(1)	(2)
1. Persentase rumahtangga dengan sumber penerangan listrik (%)	97,44
2. Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri (%)	41,58
3. Rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri (%)	65,52

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

Selanjutnya dari aspek sumber air minum, dapat dikatakan kondisinya masih jauh dari ideal. Hal ini ditunjukkan, hanya sekitar 41,58 persen rumahtangga di Kabupaten Karo yang memiliki fasilitas air minum sendiri, sedangkan sisanya menggunakan fasilitas air minum secara bersama-sama bahkan tidak

memiliki. Selain fasilitas kelayakan rumah dari aspek air minum dapat dilihat dari sumbernya karena kualitas air yang digunakan terkait erat dengan tingkat kesehatan. Dibanding dengan sumber air lainnya, air kemasan merupakan sumber air yang paling baik kualitasnya kemudian disusul dengan air ledeng. Air yang berasal dari pompa, sumur, sungai, hujan dan sebagainya, dianggap kurang baik karena kemungkinan tercemar relatif cukup besar.

Tabel 9.3
 Persentase Rumahtangga
 Menurut Sumber Air Minum, di Kabupaten Karo 2010

SUMBER AIR MINUM	PERSENTASE
(1)	(2)
1 Air Dalam Kemasan	0.96
2 Ledeng	34.02
3 Pompa	10.27
4 Sumur Terlindung	4.90
5 Sumur Tidak Terlindung	0.48
6 Mata Air Terlindung	39.22
7 Mata Air Tidak Terlindung	5.24
8 Air Sungai	4.14
9 Air Hujan	0.75
10 Lainnya	0.00
JUMLAH	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Karo menggunakan sumber air minum dari mata air terlindung yaitu mencapai 39,22 persen, ledeng 34,02 persen. Sebaliknya, sumur bor mencapai 10,27 persen.

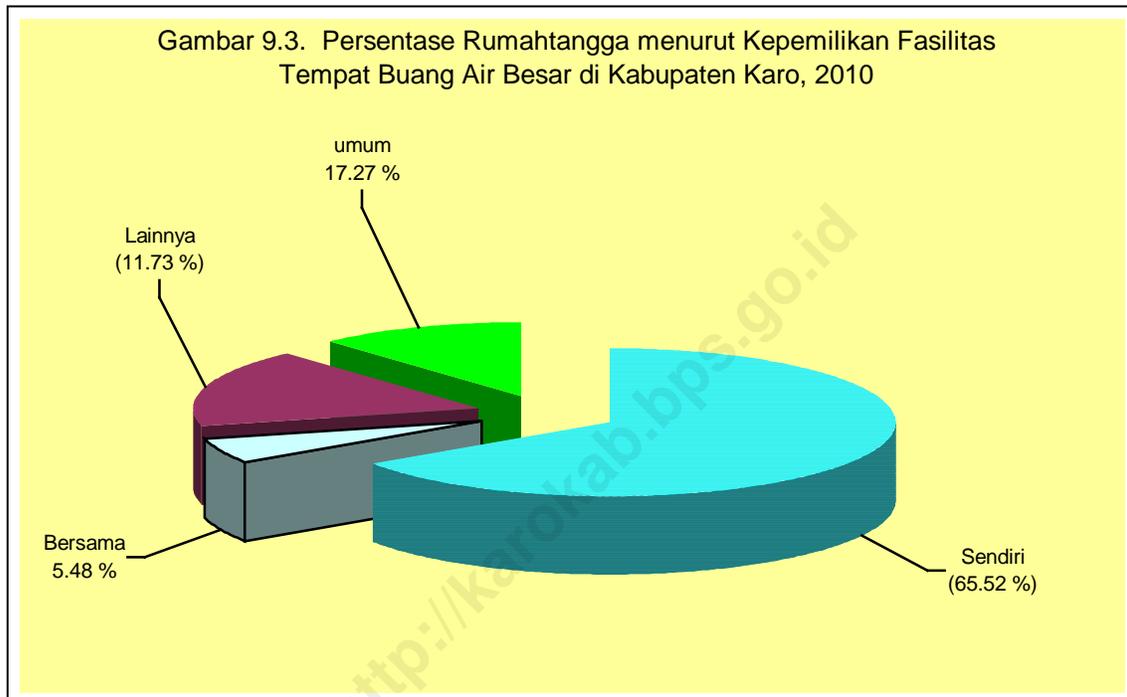
Selain sumber air minum dan listrik, fasilitas rumah lainnya yang sangat penting adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur). Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Tangki septik merupakan pilihan terbanyak rumahtangga yaitu sebesar 70,97 persen. Selain itu masih terdapat sekitar 11,11 persen tempat penampungan di tempat lain dan 17,25 persen di sungai/danau/laut.

Tabel 9.4.
Persentase Rumahtangga menurut Tempat Penampungan Akhir Buang Air Besar, 2010

Tempat penampungan akhir	Persentase
[1]	[2]
1. Tangki Septik	70,97
2. Kolam/sawah	0,67
3. Sungai/Danau	17,25
4. Lainnya	11,11

Sumber: BPS Kabupaten Karo, Susenas 2010

Jika dilihat dari status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumahtangga di Kabupaten Karo sudah mempunyai fasilitas sendiri (65,52 persen).



D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO

Jl. Jamin Gintings No: 131, Raya, Berastagi

Telp. (0628) 92675, Fax. (0628) 92851

Email: bps1211@mailhost.bps.go.id

Website : karokab.bps.go.id